

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam konteks pembangunan, bangsa Indonesia sejak lama telah mencanangkan suatu gerakan pembangunan yang dikenal dengan istilah pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan bersinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik yang bersifat material maupun spritual.

Untuk itu pemerintah harus berusaha meningkatkan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan. Dalam menunjang keberhasilan pembangunan diperlukan penerimaan yang kuat, dimana sumber pembiayaan diusahakan tetap bertumpu pada penerimaan dalam negeri dan penerimaan dari sumber-sumber luar negeri hanya sebagai pelengkap.

Kemandirian pembangunan diperlukan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Hal ini tidak terlepas dari keberhasilan penyelenggaraan pemerintah propinsi maupun kabupaten/kota yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah pusat dengan kebijaksanaannya. Kebijakan tentang keuangan daerah ditempuh oleh pemerintah pusat agar pemerintah daerah mempunyai kemampuan membiayai pembangunan daerahnya sesuai dengan prinsip daerah otonomi yang nyata.

Setelah pemerintah pusat mengeluarkan Undang-Undang No 22 Tahun 1999 dan diperbaharui dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang

pemerintahan daerah yang terfokus pada otonomi daerah dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, maka pemerintah daerah diberi kekuasaan yang lebih besar untuk mengatur anggaran daerahnya.

Untuk mendukung pelaksanaan otonomi yang maksimal pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan dibidang penerimaan daerah yang berorientasi pada peningkatan kemampuan daerah untuk membiayai urusan rumah tangganya sendiri dan diprioritaskan pada penggalian dana mobilisasi sumber-sumber daerah. Sumber pendapatan daerah menurut Undang-Undang No. 33 tahun 2004 adalah :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari:
 - Hasil pajak daerah.
 - Hasil retribusi daerah.
 - Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
 - Pendapatan asli daerah yang sah.
2. Dana perimbangan.
3. Pinjaman daerah.
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan oleh masing-masing daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Tapi pada

kenyataannya kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan dan belanja daerah masih kecil. Selama ini dominasi sumbangan pemerintah pusat kepada daerah masih besar. Oleh karenanya untuk mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah perlu berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang salah satunya dengan penggalan potensi daerah.

Kabupaten Purworejo merupakan salah satu kabupaten/kota yang ada di Propinsi Jawa Tengah. Guna meningkatkan kemampuannya dalam bidang pendanaan untuk pembangunan, Kabupaten Purworejo berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak daerah. Jenis jenis pajak daerah menurut Undang Undang No. 34 tahun 2000 adalah :

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Bahan Galian C
7. Pajak Parkir.

Di Kabupaten Purworejo salah satu pajak daerah meliputi pajak hotel dan restoran yang merupakan sumber penerimaan yang potensial apabila dimaksimalkan, karena untuk tahun 2004 sampai dengan bulan Desember dari target penerimaan pajak hotel dan restoran yang direncanakan pemerintah Kabupaten Purworejo sebesar Rp.235.000.000,- telah terealisasi sebesar

Rp.182.986.650,-. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Purworejo sangat potensial. Perkembangan penerimaan pajak Hotel dan Restoran, pendapatan asli daerah, jumlah hotel dan restoran, jumlah wisatawan, laju inflasi selama lima belas tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 1.1. berikut :

Tabel 1.1
Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran dan Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Purworejo Tahun 1989/1990 – 2003

Tahun Anggaran	Target pajak Hotel dan Restoran (Rp)	Realisasi Pajak Hotel dan Restoran (Rp)	Pendapatan Asli Daerah (Rp)
1989/1990	17.000.000	18.333.751	2.193.232.546
1990/1991	20.000.000	21.104.673	2.522.405.166
1991/1992	23.000.000	23.244.541	2.914.366.412
1992/1993	25.000.000	25.215.233	3.486.403.214
1993/1994	28.000.000	28.567.098	4.586.042.314
1994/1995	29.000.000	32.336.722	4.733.120.305
1995/1996	32.000.000	33.129.555	5.607.523.276
1996/1997	33.500.000	33.648.149	5.729.748.934
1997/1998	50.000.000	50.832.054	7.549.908.608
1998/1999	51.000.000	51.015.474	7.836.030.435
1999/2000	55.000.000	55.615.474	6.241.994.048
2000	150.000.000	153.898.124	8.818.818.074
2001	155.000.000	155.432.241	15.253.704.832
2002	166.000.000	166.105.100	20.914.955.409
2003	195.000.000	200.157.000	24.492.030.536

Sumber data : Denda Kabupaten Purworejo

Tabel 1.2.
Jumlah Hotel dan Restoran Kabupaten Purworejo
Tahun 1989/1990 – 2003

Tahun	Jumlah Hotel dan Restoran (unit)
1989/1990	90
1990/1991	111
1991/1992	144
1992/1993	168
1993/1994	190
1994/1995	199
1995/1996	234
1996/1997	253
1997/1998	267
1998/1999	244
1999/2000	279
2000	281
2001	299
2002	300
2003	334

Sumber: Dipenda Kabupaten Purworejo

Tabel 1.3.
Jumlah Wisatawan Nusantara di Kabupaten Purworejo
Tahun 1989/1990 – 2003

Tahun	Jumlah Wisatawan Nusantara (orang)
1989/1990	10.204
1990/1991	10.810
1991/1992	14.512
1992/1993	10.777
1993/1994	50.555
1994/1995	65.425
1995/1996	78.665
1996/1997	101.572
1997/1998	177.564
1998/1999	200.256
1999/2000	202.018
2000	152.365
2001	101.805
2002	125.615
2003	144.777

Sumber: Kebudayaan dan Pariwisata Purworejo

Tabel 1.4.
Laju Inflasi di Kabupaten Purworejo
Tahun 1989/1990 - 2003

Tahun	Tingkat Inflasi (%)
1989/1990	10,73
1990/1991	8,38
1991/1992	4,40
1992/1993	10,01
1993/1994	8,42
1994/1995	9,48
1995/1996	7,20
1996/1997	8,09
1997/1998	4,09
1998/1999	10,74
1999/2000	4,16
2000	8,42
2001	15,97
2002	10,97
2003	3,21

Sumber : Badan Pusat statistik Kabupaten Purworejo

Pajak Hotel dan Restoran menurut peraturan pemerintah No 65 tahun 2001 mempunyai pengertian sebagai berikut :

- Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.
- Restoran adalah tempat menyantap makanan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga dan catering.

Untuk itu pemerintah perlu berupaya meningkatkan penerimaan pajak Hotel dan Restoran, agar penerimaan pemerintah terus meningkat sehingga dapat mempelancar pembangunan. Untuk mencapai ini pemerintah harus melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam bidang keuangan daerah yang dikelola secara efektif dan efisien. Dengan dasar pertimbangan ini, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo sebagai pelaksana pemerintahan di daerah secara aktif melakukan upaya pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah yang salah satunya adalah pajak Hotel dan Restoran. Berdasarkan pemikiran dan keadaan tersebut, maka penulis memilih judul **“ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 1989-2003”**

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas dapat diambil pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Seberapa besar kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purworejo?
2. Bagaimana keefektifan dan efisiensi administrasi penerimaan pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Purworejo?
3. Bagaimana pengaruh jumlah hotel dan restoran, tingkat inflasi dan jumlah wisatawan nusantara terhadap realisasi pajak hotel dan restoran di Purworejo?

1.3. Manfaat dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini yaitu:

1. Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan bukti tentang kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Purworejo.
2. Untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi penerimaan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Purworejo.
3. Untuk mengetahui seberapa besar jumlah hotel dan restoran, tingkat inflasi dan jumlah wisatawan nusantara mempengaruhi realisasi pajak hotel dan restoran di Kabupaten Purworejo.

1.3.2. Manfaat yang dapat diperoleh apabila penelitian dapat tercapai yaitu:

1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna dan menambah perbendaharaan penelitian yang telah ada (bahan pustaka) serta dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi pengembangan penelitian-penelitian selanjutnya.
2. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo dalam memaksimalkan penerimaan dan menentukan kebijakan dalam masalah pajak hotel dan restoran.
3. Dengan penelitian ini membantu penulis menyelesaikan studi dalam usaha memperoleh gelar Strata-I (S-1) sekaligus mengamalkan ilmu yang diperoleh dari bangku kuliah.

1.4. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Unsur-unsur yang dimuat dalam bab ini yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat dan tujuan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Umum Subjek Penelitian

Bab ini merupakan uraian/ deskripsi/ gambaran secara umum atas subjek penelitian. Deskripsi dilakukan dengan merujuk pada fakta yang bersumber pada data yang bersifat umum sebagai wacana pemahaman secara makro yang berkaitan dengan penelitian.

Bab III: Kajian Pustaka

Bab ini berisi pendokumentasian dan pengajian hasil dari penelitian-penelitian yang pernah dilakukan pada area yang sama. Dari usaha ini akan ditemukan kelemahan pada penelitian yang lalu, sehingga dapat dijelaskan dimana letak hubungan dan perbedaan.

Bab IV: Landasan Teori dan Hipotesis

Bab ini berisi mengenai teori yang digunakan untuk mendekati permasalahan yang akan diteliti.

Bab V : Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang metode analisis yang digunakan dalam penelitian dan data-data yang digunakan beserta sumber data.

Bab VI: Analisis dan Pembahasan

Bab ini berisi semua temuan-temuan yang dihasilkan dalam penelitian dan analisis statistik.

Bab VII: Simpulan dan Implikasi

Bab ini berisi tentang jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada rumusan masalah dan dari sini dapat ditarik benang merah apa implikasi teoritis penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM DAN SUBJEK PENELITIAN

2.1. Keadaan Geografi

Kabupaten Purworejo merupakan salah satu Kabupaten di Wilayah Propinsi Jawa tengah. Kabupaten Purworejo terdiri dari 16 kecamatan, yaitu Grabag, Ngombol, Purwodadi, Bagelen, Kaligesing, Purworejo, Banyuurip, Bayan, Kutoarjo, Butuh, Pituruh, Kemiri, Bruno, Gebang, Loano, Bener.

Secara administratif Kabupaten Purworejo berbatasan dengan beberapa kabupaten di Propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Jogjakarta. Batas-batas wilayah Kabupaten Purworejo dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Batas Wilayah Kabupaten Purworejo

Sebelah/bagian	Perbatasan
1. Utara	Kabupaten Wonosobo
2. Selatan	Samudera Indonesia
3. Barat	Kabupaten Kebumen
4. Timur	Kabupaten Kulonprogo (Daerah Istimewa Jogjakarta)

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo

Secara geografis wilayah Kabupaten Purworejo terletak pada posisi $109^{\circ} 47' 28''$ sampai $110^{\circ} 8' 20''$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 32''$ sampai $7^{\circ} 54''$ Lintang Selatan. Secara topografis dan fisiografis Kabupaten Purworejo merupakan Wilayah yang terdiri dari daratan rendah, dataran tinggi dan pantai. Sehingga Kabupaten Purworejo merupakan daerah yang potensial untuk pengembangan sektor pertanian, perkebunan dan perikanan.

2.2. Luas Wilayah

Berdasarkan data dari Biro Pusat Statistik Kabupaten Purworejo luas wilayah Kabupaten Purworejo adalah $103,481,752 \text{ Km}^2$ yang terbagi menjadi 16 kecamatan. Kecamatan yang memiliki wilayah paling luas adalah kecamatan Bruno dengan luas wilayah $108,43 \text{ Km}^2$ dan Kecamatan yang paling sempit adalah Kecamatan Kutoarjo dengan luas wilayah $37,59 \text{ Km}^2$. Luas wilayah keseluruhan di kabupaten Purworejo dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2
Luas Wilayah Kabupaten Purworejo Dirinci menurut Kecamatan

Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)
Grabag	64,92
Ngombol	55,27
Purwodadi	53,96
Bagelen	63,76
Kaligesing	74,73
Purworejo	52,72
Banyuwirip	45,08
Bayan	43,21
Kutoarjo	37,59
Butuh	46,08
Pituruh	77,42
Kemiri	92,05
Bruno	108,43
Gebang	71,86
Loano	53,65
Bener	94,08

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo

2.3. Keadaan Penduduk

1. Jumlah Penduduk

Dari segi kependudukan keadaan penduduk Kabupaten Purworejo dari tahun ke tahun terus mengalami fluktuasi. Sampai dengan tahun 2003 jumlah penduduk berjumlah 770 993 jiwa seperti yang terlihat dalam tabel 2.3.

Tabel 2.3
Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Purworejo
Tahun 1989/1990-2003

Tahun	Jumlah Penduduk (orang)	Pertumbuhan (%)
1989	721 490	0,42
1990	723 399	0,26
1991	726 004	0,36
1992	729 727	0,51
1993	731 889	0,30
1994	735 379	0,48
1995	740 528	0,70
1996	744 881	0,59
1997	750 922	0,81
1998	756 906	0,80
1999	760 283	0,45
2000	764 084	0,50
2001	767 381	0,43
2002	769 240	0,24
2003	770 993	0,47

Sumber : Badan Pusat Statistik Purworejo

Dari tabel 2.3 tersebut, pertumbuhan penduduk Kabupaten Purworejo paling besar terjadi pada tahun 1997 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 0,81 persen. Sedangkan pertumbuhan paling kecil terjadi pada tahun 2002 sebesar 0,24 persen.

2. Penyebaran Penduduk

Berdasarkan data registrasi penduduk akhir tahun 2003, jumlah penduduk Kabupaten Purworejo adalah 770993 jiwa. Dengan luas wilayah 1 034,82 Km², tersebar 16 kecamatan di Kabupaten Purworejo seperti yang terlihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.4
Persebaran Penduduk Kabupaten Purworejo Tahun 2003

Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Penduduk (orang)	Kepadatan (Per Km ²)
Grabag	64,92	50 407	776
Ngombol	55,27	37 059	671
Purwodadi	53,96	41 359	766
Bagelen	63,76	35 345	554
Kaligesing	74,73	35 717	478
Purworejo	52,72	88 728	1.683
Banyuurip	45,08	40 976	909
Bayan	43,21	47 472	1.099
Kutoarjo	37,59	64 050	1.704
Butuh	46,08	45 769	993
Piturah	77,42	52 494	678
Kemiri	92,05	55 689	605
Bruno	108,43	43 762	404
Gebang	71,86	41 930	583
Loano	53,65	35 913	669
Bener	94,08	54 323	577
Jumlah	1 034,82	770 993	745

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo

2.4. Tenaga Kerja

Berdasarkan survai yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di Kabupaten Purworejo, jumlah tenaga kerja yang bekerja sebanyak 396.792 orang. Dari jumlah tersebut, tenaga kerja yang berjenis kelamin laki-laki 239.892 orang dan perempuan sebanyak 156.900 orang. Tersebar di sepuluh jenis lapangan pekerjaan di Kabupaten Purworejo. Kesepuluh jenis lapangan pekerjaan dan jumlah tenaga kerja yaitu pertanian 267.891 orang, pertambangan dan penggalian 1.719 orang, Industri 35.802 orang, Listrik, gas dan air 175 orang, konstruksi 12.780 orang, perdagangan 42.086 orang, komunikasi 11.060 orang, keuangan 585 orang, jasa-jasa 24.694 orang. Data tersebut seperti dalam tabel 2.5.

Tabel 2.5
Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan
Di Kabupaten Purworejo Tahun 2003

Lapangan Pekerjaan Utama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Pertanian	168 883	99 008	267 891
Petambangan dan Penggalian	839	880	1 719
Industri	13 098	22 704	35 802
Listrik, gas dan air	149	26	175
Konstruksi	12 689	91	12 780
Perdagangan	19 382	22 704	42 086
Komunikasi	10 699	361	11 060
Keuangan	287	298	585
Jasa-jasa	13 866	10 828	24 694
Lainnya	-	-	-
Jumlah	239 892	156 900	396 792

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo

2.5. Keadaan Ekonomi

Salah satu indikator penting untuk menganalisis pembangunan ekonomi yang terjadi di suatu daerah adalah pertumbuhan ekonomi. Perekonomian yang dikatakan mengalami pertumbuhan apabila jumlah balas jasa riil terhadap penggunaan faktor produksi pada periode tertentu lebih besar dari periode sebelumnya.

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Yang perlu diperhatikan dalam menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi adalah penggunaan angka-angka PDRB dalam harga konstan, hal ini dimaksudkan agar pengaruh perubahan harga terhadap nilai pendapatan atas dasar harga berlaku telah dihilangkan. Disamping itu, angka pertumbuhan pendapatan pada harga konstan sekaligus mencerminkan ada tidaknya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Secara umum keadaan ekonomi Kabupaten Purworejo sangat baik yang ditandai dengan laju pertumbuhan ekonomi 4,03 persen pada tahun 2003. Laju pertumbuhan ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi tahun 2002 yang hanya 3,67 persen.

PDRB perkapita merupakan salah satu indikator produktivitas penduduk, dihitung dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang bersangkutan.

2.6. Perindustrian

Industri pengolahan di Kabupaten Purworejo di kelompokkan ke dalam empat golongan berdasarkan banyaknya pekerja yaitu:

1. Industri besar adalah perusahaan yang mempunyai pekerja 100 orang atau lebih.

Jumlah industri besar yang ada di Kabupaten Purworejo tahun 2003 menurut hasil survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik sebanyak 7 buah yang tersebar di kecamatan Banyuurip, Loano dan Bayan. Sedangkan jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor industri tersebut berjumlah 2.047 orang.

2. Industri sedang adalah perusahaan yang mempunyai pekerja 20-99 orang
Sedangkan jumlah industri sedang yang berada di kabupaten Purworejo yang tercatat pada tahun 2003 berjumlah 21 buah yang tersebar di kecamatan Purworejo, Banyuurip, Bayan, Kutoarjo, Pituruh, Bener dan Loano. Sedangkan tenaga kerja yang terserap berjumlah 732 orang.
3. Industri kecil adalah perusahaan yang mempunyai pekerja 5-19 orang
Berdasarkan survai Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo pada tahun 2003 jumlah industri kecil berjumlah 103 buah yang tersebar di semua kecamatan di Purworejo, dengan tenaga kerja 830 orang.

4. Industri rumah tangga adalah usaha kerajinan rumah tangga yang mempunyai pekerja antara 1-4 orang.

Sedang usaha kecil berjumlah 5.736 usaha yang teresebar di semua Kecamatan di Purworejo, dengan menyerap tenaga kerja 33.829 orang.

2.7. Dinas Pendapatan Daerah

Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Kabupaten Purworejo didirikan pada tanggal 1 April 1972, sedangkan mulai pelaksanaan tugas dimulai tanggal 1 Mei 1972. Adapun tugas kantor Dinas Pendapatan Daerah adalah melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang pendapatan daerah dan tugas-tugas lainnya yang diserahkan oleh kepala daerah.

Pada awalnya kantor Dinas Pendapatan Daerah mempunyai wilayah operasional antara lain:

1. 25 Pasar daerah
2. 1 Stasiun bus
3. 1 Pemandian simbar joyo
4. 1 Peda pedesaan
5. pajak-pajak daerah

Dengan adanya perubahan dari tahun ketahun dan disahkan Undang-Undang No. 22 tahun 1999 yang diperbarui dengan Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah maka tugas pokok dalam melaksanakan kewenangan daerah mengalami perubahan pula. Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan daerah dan mengkoordinasikan bidang pendapatan daerah yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan lain-lain, serta pengembangan dan pengendalian operasional.

DIPENDA merupakan unsur pelaksana kewenangan daerah dibidang pendapatan daerah, dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di

bawah dan tanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah. Kepala dinas membawahi :

1. **Bagain Tata Usaha**

Mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perencanaan dan program kerja. Pelayanan administrasi dan pelaporan bidang ketatausahaan, keuangan, umum dan kepegawaian, serta pengordinasian tugas perencanaan umum, evaluasi dan pelaporan. Bagian tata usaha membawahi :

- a. Sub bagian perencanaan dan keuangan
- b. Sub bagian umum dan kepegawaian

2. **Bidang Pajak Daerah**

Mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perencanaan dan program kerja, pelayanan administrasi dan teknis, pembinaan dan bimbingan. Evaluasi dan pelaporan bidang pajak daerah yang meliputi pendataan dan penetapan serta pemungutan dan pelaporan. Bidang pajak daerah meliputi :

- a. Seksi pendataan dan penetapan
- b. Seksi pemungutan dan pelaporan

3. **Bidang Retribusi Daerah**

Mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perencanaan dan program kerja, pelayanan administrasi dan teknis, pembinaan dan bimbingan. Evaluasi dan pelaporan bidang retribusi daerah yang meliputi pendataan dan penetapan serta pemungutan dan pelaporan. Bidang Retribusi Daerah meliputi :

- a. Seksi pendataan dan penetapan
- b. Seksi pemungutan dan pelaporan

4. Bidang Pendapatan Lain-lain

Mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perencanaan dan program kerja, pelayanan administrasi dan teknis, pembinaan dan bimbingan, evaluasi dan pelaporan bidang pendapatan lain-lain yang meliputi penetapan serta pemungutan dan pelaporan. Bidang pendapatan lain-lain meliputi :

- a. Seksi pendataan dan penetapan
- b. Seksi pemungutan dan pelaporan

5. Bidang Pengembangan dan pengendalian operasional (P2O).

Mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perencanaan dan program kerja, pelayanan administrasi dan teknis, pembinaan dan bimbingan, evaluasi dan pelaporan bidang pengembangan dan pengendalian operasional yang meliputi penetapan serta pemungutan dan pelaporan. Bidang (P2O) meliputi :

- a. Seksi pengendalian dan evaluasi
- b. Seksi penelitian, pengembangan dan penyuluhan

2.8. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purworejo

Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo perlu mengenal lebih dekat struktur PAD yang dimiliki agar dapat mengetahui sumber-sumber PAD yang dimiliki daerahnya, sehingga pemerintah daerah kabupaten Purworejo dapat

2.8. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purworejo

Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo perlu mengenal lebih dekat struktur PAD yang dimiliki agar dapat mengetahui sumber-sumber PAD yang dimiliki daerahnya, sehingga pemerintah daerah Kabupaten Purworejo dapat mengetahui sumber PAD mana yang potensial dan mana yang kurang potensial. Setelah mengetahuinya, pemerintah daerah diharapkan dapat memfokuskan perhatiannya pada sumber PAD yang potensial dan berupaya menggali lebih lanjut sumber tersebut, sedangkan PAD yang kurang potensial, pemerintah daerah dapat melakukan koreksi dan mengkaji lebih lanjut mengapa penerimaan pada pos atau sumber tersebut rendah, apakah karena objeknya terbatas atau adanya kendala-kendala yang menyebabkan terhambatnya penerimaan PAD tersebut.

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purworejo dari tahun 1989/1990 sampai dengan tahun 2003 didominasi oleh penerimaan dari retribusi daerah dan pajak daerah. Tahun anggaran 1989/1990-1998/1999 berjalan dari tanggal 1 April – 31 Maret (12 bulan). Tahun 1999/2000 hanya 9 bulan di mulai dari 1 April – 31 Desember. Tahun 2000-2003 dimulai dari 1 Januari – 31 Desember. Untuk mengetahui besarnya pertumbuhan penerimaan pendapatan asli daerah dapat dilihat pada tabel 2.6.

Tabel 2.6
Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purworejo
Tahun Anggaran 1989/1990-2003

Tahun Anggaran	Penerimaan PAD (Rp)	Pertumbuhan (%)
1989/1990	18.333.751,00	-
1990/1991	21.104.673,00	1.30
1991/1992	23.244.541,00	1.55
1992/1993	25.215.233,00	19.62
1993/1994	28.567.098,00	31.54
1994/1995	32.336.722,00,	3.20
1995/1996	33.129.555,00	18.47
1996/1997	33.648.149,00	2.17
1997/1998	50.832.054,00	31.76
1998/1999	51.015.474,00	3.78
1999/2000	55.615.474,00	20.34
2000	153.898.124,00	41.28
2001	155.432.241,00	72.96
2002	166.105.100,00	37.11
2003	200.157.000,00	17.10

Sumber: Dipenda Kabupaten Purworejo

1. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purworejo yang memiliki peran yang cukup besar dan menunjang pembagunan yang sedang dilaksanakan. Retribusi Daerah menduduki peringkat pertama sebagai penunjang pendapatan asli daerah. Tahun anggaran 1989/1990-1998/1999 berjalan dari tanggal 1 April – 31 Maret (12 bulan). Tahun 1999/2000 hanya 9 bulan di mulai dari 1 April – 31 Desember. Tahun 2000-2003 dimulai dari 1 Januari – 31 Desember.

Tabel 2.7.
Pertumbuhan Retribusi Daerah Kabupaten Purworejo
Tahun Anggaran 1989/1990-2003

Tahun Anggaran	Penerimaan Retribusi Daerah (Rp)	Pertumbuhan (%)
1989/1990	863.244.729	-
1990/1991	873.554.277	1.19
1991/1992	937.583.516	7.32
1992/1993	1.238.628.461	32.10
1993/1994	1.483.827.365	19.79
1994/1995	1.646.855.975	10.98
1995/1996	1.855.570.710	11.24
1996/1997	2.114.568.031	13.95
1997/1998	2.022.004.244	4.37
1998/1999	4.699.727.809	132.42
1999/2000	5.381.189.398	14.50
2000	6.884.374.455	27.93
2001	9.919.417.468	44.08
2002	13.135.419.038	32.42
2003	15.380.223.017	17.08

Sumber: Dipenda Kabupaten Purworejo

2. Pajak Daerah

Pajak daerah sebagaimana retribusi daerah juga merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purworejo yang cukup penting. Sebagaimana retribusi daerah, jumlah penerimaan sektor pajak dalam menunjang penerimaan pendapatan asli daerah juga mengalami peningkatan. Tahun anggaran 1989/1990-1998/1999 berjalan dari tanggal 1 April – 31 Maret (12 bulan). Tahun 1999/2000 hanya 9 bulan di mulai dari 1 April – 31 Desember. Tahun 2000-2003 dimulai dari 1 Januari – 31 Desember.

Tabel 2.8
Pertumbuhan Pajak Daerah Kabupaten Purworejo
Tahun Anggaran 1989/1990-2003

Tahun Anggaran	Penerimaan Pajak Daerah (Rp)	Pertumbuhan (%)
1989/1990	282.767.853	-
1990/1991	367.839.205	30.08
1991/1992	372.689.326	1.31
1992/1993	465.543.228	24.91
1993/1994	500.356.342	7.47
1994/1995	567.540.020	13.42
1995/1996	680.138.232	19.83
1996/1997	712.744.145	4.79
1997/1998	925.520.304	29.85
1998/1999	951.879.396	2.84
1999/2000	1.210.665.586	2.71
2000	1.255.303.936	12.09
2001	2.260.070.575	82.42
2002	3.281.552.707	45.19
2003	4.129.177.453	25.83

Sumber: Dipenda Kabupaten Purworejo

3. Pajak Hotel dan Restoran

Pajak hotel dan restoran merupakan bagian dari pajak daerah yang merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah di Kabupaten Purworejo. Pajak hotel dan restoran di Kabupaten Purworejo diperoleh dari tarif pajak hotel dan restoran yang ditetapkan 10% dari jumlah pembayaran yang dilakukan kepada pengusaha hotel, restoran dan usaha sejenis. Tahun anggaran 1989/1990-1998/1999 berjalan dari tanggal 1 April – 31 Maret (12 bulan). Tahun 1999/2000 hanya 9 bulan di mulai dari 1 April – 31 Desember. Tahun 2000-2003 dimulai dari 1 Januari – 31 Desember.

Tabel 2.9.
Pertumbuhan Pajak Hotel dan Restoran Kabupaten Purworejo
Tahun Anggaran 1989/1990-2003

Tahun Anggaran	Penerimaan hotel & restoran (Rp)	Pertumbuhan (%)
1989/1990	18.333.751,00	-
1990/1991	21.104.673,00	15.11
1991/1992	23.244.541,00	10.13
1992/1993	25.215.233,00	8.47
1993/1994	28.567.098,00	13.29
1994/1995	32.336.722,00	13.19
1995/1996	33.129.555,00	2.45
1996/1997	33.648.149,00	1.54
1997/1998	50.832.054,00	51.06
1998/1999	51.015.474,00	0.36
1999/2000	55.615.474,00	90.16
2000	153.898.124,00	176.71
2001	155.432.241,00	0.99
2002	166.105.100,00	6.42
2003	200.157.000,00	20.50

Sumber: *Dipenda Kabupaten Purworejo*

BAB III

KAJIAN PUSTAKA

Dari beberapa penelitian yang terdahulu yang sejenis atau studi yang pernah dilakukan, maka kajian pustaka yang dijadikan pertimbangan adalah sebagai berikut:

1. Skripsi karya Sigit kuncoro, dengan judul “Analisis Kinerja Pemungutan Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 1998-2002”. Hasil dari analisis adalah:
 - a. Bahwa pemungutan pajak daerah memberikan kontribusi yang cenderung meningkat.
 - b. Tingkat efektifitas pajak daerah apabila dihitung berdasarkan target yang ditetapkan pemerintah daerah cukup tinggi, tetapi jika tingkat efektifitas pajak daerah dihitung berdasarkan potensi yang sesungguhnya maka pajak daerah kurang efektif.

2. Skripsi karya Nugroho Afrianto, dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Dati II Klaten Tahun Anggaran 1983/1984-1999/2000”. Hasil dari analisis itu adalah :
 - a. Sektor pariwisata di Kabupaten Klaten belum memberikan sumbangan yang signifikan (penting) bagi penerimaan pendapatan asli daerah di Kabupaten Klaten. Hal ini dapat disebabkan karena

beberapa objek wisata dengan pengunjung yang cukup besar jumlahnya tidak dipungut bea masuk (retribusi) sebagai sumber pendapatan daerah pariwisata dan terdapat pula beberapa wajib retribusi tidak memperpanjang ijin usahanya yang telah habis atau tidak melakukan pendaftaran kembali

- b. Keberadaan industri besar dan sedang di kabupaten Klaten belum memberikan sumbangan yang signifikan (penting) bagi penerimaan Pendapatan asli daerah Kabupaten Klaten.
3. Skripsi Karya Husin Muhammad, dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak Hotel dan Restoran“, studi kasus pada Pemkot Surabaya. Hasil dari analisisnya:
- a. Desentralisasi khususnya di bidang keuangan tertumpu pada Pendapata Asli Daerah (PAD). PAD berasal dari berbagai sektor, yaitu Pajak Daerah, Retribusi Dareah, Laba BUMD, Penerimaan dari dinas-dinas dan penerimaan lainnya. Pajak daerah merupakan PAD yang bisa diandalkan salah satunya dari pajak hotel dan restoran. Pajak hotel dan restoran di Kodya Surabaya dari tahun ke tahun semakin meningkat, untuk itu perlu diadakan peningkatannya.
 - b. Variabel yang dianggap berpengaruh terhadap realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran dan yang dibilih dalam penelitian ini yang penggunaan alat regresi linier adalah tepat, hal

ini dapat dilihat dari besarnya R^2 yang diperoleh adalah 0.897 menunjukkan bahwa dari penerimaan pajak hotel dan restoran dipengaruhi oleh variasi dari pendapatan perkapita, jumlah mahasiswa dan jumlah investasi hotel dan restoran sebesar 89,7%.

- c. Untuk F-test sebesar 40.722 yang lebih besar dari F-tabel menunjukkan secara bersama-sama realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran di kodya Dati II Surabaya dipengaruhi oleh pendapatan perkapita, jumlah investasi hotel dan restoran.
- d. Dari ketiga hipotesis yang digunakan sebagai pedoman penelitian ini tentang pengaruh variabel independen, ternyata dari tiga variabel independen tersebut ada satu yang tidak berpengaruh secara nyata tetapi positif di dalam uji individu yaitu jumlah mahasiswa.
- e. Pada penelitian yang menyatakan bahwa koefisien elastisitas untuk variabel independen yaitu pendapatan perkapita, jumlah mahasiswa, investasi hotel dan restoran yang berpengaruh terhadap variabel dependen adalah benar.
 - Elastisitas pendapatan perkapita Kodya Surabaya sebesar 1.195 artinya dengan kenaikan pendapatan perkapita sebesar 1% *ceteris paribus*, maka realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran Kodya Surabaya naik sebesar 1.195%.

- Elastisitas pendapatan perkapita kodya surabaya sebesar 0.262 artinya dengan kenaikan jumlah mahasiswa 1% *ceteris paribus*, maka realisasi penerimaan pajak Hotel dan restoran kodya surabaya naik sebesar 0.262%

BAB IV

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

4.1. Perpajakan di Indonesia

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan bersinambungan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat baik secara material maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan. Salah satu usaha dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan menggali sumber-sumber dana yang berasal dari dalam negeri yaitu pajak.

Pajak adalah pembayaran iuran oleh rakyat kepada pemerintah. Banyak ahli memberikan batasan tentang pajak, definisi pajak menurut para pakar adalah:

- a. Mr. Dr .N. J. Feldmann, pajak adalah “prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa, (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa ada kontra-prestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum”.
- b. Prof. Dr. Rachmat Soemitro, S.H., pajak adalah “iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dipaksakan) dengan tiada pendapat jasa-timbal (kontra-prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.
- c. Prof. Dr. M. J. H Smeets, pajak adalah “prestasi pada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakannya, tanpa ada kontra-prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang

individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah”.

- d. Dr. Soeparman Soemahamidjaja, pajak adalah “iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”.

Dari pengertian pajak di atas, dapat disimpulkan bahwa ada lima unsur yang melekat dalam pengertian pajak adalah :

- a. Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang.
- b. Sifatnya dapat dipaksakan.
- c. Tidak ada kontra-prestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak.
- d. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah (tidak boleh dipungut oleh swasta)
- e. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum.

4.2. Aspek Ekonomi Perpajakan

Pembiayaan belanja riil Pemerintah memerlukan uang untuk membiayai hutang-hutangnya. Untuk itu diperoleh dari pemungutan pajak dan digunakan untuk membiayai belanjanya. Hanya saja dalam pembangunan sebuah kapal, rumah sakit maupun sarana umum lainnya pemerintah tidak semata-mata hanya memerlukan uang, akan tetapi juga sumber daya ekonomi yang riil. Untuk itu

pemerintah juga memerlukan baja dan tenaga terdidik, singkatnya pemerintah membutuhkan pemanfaatan persediaan masyarakat akan tenaga kerja, tanah dan barang modal yang langka.

Sebenarnya masyarakat dalam menentukan cara membebani dirinya dengan pajak, juga menetapkan bagaimana memperoleh sumber-sumber daya yang diperlukan dari berbagai keluarga dan badan usaha yang ada dalam masyarakat tersebut, agar dapat dimanfaatkan untuk barang dan jasa umum disamping untuk program transfer pendapatan.

Konsep tentang “manfaat” (*benefit*) dan kemampuan membayar (*ability to pay*) merupakan dua prinsip dari teori perpajakan. Norma keadilan menyiratkan agar menggunakan pajak yang sama. Suatu pajak dapat di sebut progresif, proporsional, atau regresif jika membebani pendapatan orang kaya dibanding mereka yang miskin dalam proporsi yang lebih besar, sama atau lebih kecil.

4.3. Hubungan Antara Pajak dengan Pendapatan

Dalam suatu jenis pajak kita akan mengenal istilah pajak proporsional, pajak progresif, dan pajak regresif yang tentunya berkaitan dengan masalah pendapatan. Suatu pajak akan disebut proporsional jika mengenakan tarif presentase yang sama tanpa melihat pendapatan seseorang. Sehingga setiap pembayaran pajak dikenakan tarif pajak dalam proporsi yang sama dari pendapatannya. Sedangkan untuk pajak progresif berbeda sama sekali dengan pajak proporsional.

Pajak progresif adalah pajak yang mengenakan tarif dalam persentase yang meningkat menurut bertambah tingginya pendapatan seseorang. Sedangkan pajak regresif adalah pajak yang mengenakan tarif persentase yang lebih rendah pada mereka yang berpendapatan tinggi. Istilah progresif dan regresif mungkin akan menimbulkan kekacauan pengertian. Kata-kata itu merupakan istilah teknis yang berkaitan dengan proporsi pajak terhadap berbagai pendapatan.

4.4. Pengklasifikasian Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.

a. Menurut golongan

Menurut golongan, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung

- **Pajak langsung**

Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak bisa dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan.

Contoh: Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

- **Pajak tidak langsung**

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak

langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misal terjadi penyerahan barang atau jasa.

Contoh: Pajak Pertambahan nilai.

Untuk menentukan apakah sesuatu termasuk pajak langsung atau pajak tidak langsung dalam arti ekonomis, dilakukan dengan melihat ketiga unsur yang terdapat dalam kewajiban pemenuhan perpajakannya. Ketiga unsur tersebut terdiri atas:

- Penanggung jawab pajak, adalah orang yang secara formal yuridis diharuskan melunasi pajak.
- Penanggung pajak, adalah orang yang dalam faktanya memikul dulu beban pajaknya.
- Pemikul pajak, adalah orang yang menurut maksud pembuat undang-undang harus dibebani pajak.

Jika ketiga unsur tersebut ditemukan pada seseorang maka pajaknya disebut pajak langsung, sebaliknya jika unsur tersebut terpisah atau terdapat pada lebih dari satu orang, maka pajaknya disebut pajak tidak langsung.

b. Menurut sifat

Menurut sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak subjektif dan pajak objektif.

- Pajak subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.

Contoh: pajak penghasilan.

- Pajak obyektif

Pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal.

Contoh: Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

c. Menurut Lembaga Pemungut

- Pajak Negara atau Pajak Pusat

Pajak negara atau pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

- Pajak daerah

Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak daerah terdiri dari :

- Pajak daerah TK I (Propinsi), contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

- Pajak Daerah TK II (kotamadya/kabupaten), contoh : Pajak Pembangunan I, Pajak Penerangan Jalan.

4.5. Fungsi Pajak

Pembangunan yang ada selama ini tidak terlepas dari peran serta masyarakat dalam membayar pajak. Karena hasil dari penerimaan pajak tersebut digunakan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan bagi kesejahteraan rakyat. Dengan demikian pajak mempunyai beberapa fungsi, antara lain:

a. Fungsi *Budgetary*

Dalam fungsinya sebagai *budgetary*, pajak dipergunakan sebagai alat untuk mengumpulkan dana guna membiayai kegiatan pemerintah, terutama kegiatan-kegiatan rutin.

b. Fungsi *Reguleri*

Sebagai fungsi *Regulatory*, yaitu mengatur perekonomian guna menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, mengadakan distribusi pendapatan serta stabilitas ekonomi.

c. Fungsi sosial

Dalam fungsi ini hak milik seseorang diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat atau boleh dikatakan bahwa besarnya pemungutan pajak harus disesuaikan dengan kekuatan seseorang untuk dapat mencapai kepuasan kebutuhan setinggi-tingginya setelah dikurangi yang mutlak untuk kebutuhan primer.

Cara pemungutan pajak kepada masyarakat ditandai dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945 terutama rasa keadilannya. Dengan demikian sistem atau cara pemungutan pajak kepada masyarakat wajib pajak harus melihat beberapa unsur subjektif yang ada bagi wajib pajak, yaitu :

- a. Keharusan memberi kebebasan wajib pajak atas pendapatan untuk kehidupan minimum.
- b. Keharusan memperhatikan fungsi-fungsi perorangan dan keadaan-keadaan yang berpengaruh terhadap besar kecilnya kebutuhan, seperti susunan dan keadaan keluarga, kesehatan dan sebagainya.

Jadi secara umum unsur-unsur subjektif diatas merupakan segala kebutuhan, terutama material dan juga sepirtual, makin banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, makin kecil kekuatan seseorang untuk membayar pajak.

4.6. Syarat Pemungutan Pajak

Ada empat syarat dalam pemungutan pajak agar tercapai keadilan dan kepastian hukum serta dapat tercapainya fungsi pajak, yaitu :

- a. Syarat keadilan

Syarat pemungutan pajak pada umumnya adalah mengabdikan pada keadilan, baik keadilan dalam prinsip mengenai perundang-undangan maupun dalam praktek sehari-hari. Keadilan bersifat relatif, maka dalam menentukan keadilan dibidang perpajakan bisa digunakan beberapa acuan atau prinsip sebagai berikut :

- Keadilan itu akan terasa apabila pajak itu dikenakan untuk merealisasikan tujuan negara yang bersifat menyelenggarakan kesejahteraan untuk rakyat.
- Pedoman umum dalam mengukur keadilan, yaitu asas-asas perbandingan (*evenredigheid*) yang perumusannya adalah setiap anggota masyarakat adalah sama dan sederajat.
- Pemungutan pajak haruslah umum (*algemeenheid*) dan merata (*gelijkheid*).

b. Syarat Yuridis

Pemungutan pajak harus didasarkan pada ketentuan yang legal dan formal, atau dengan kata lain harus ada dasar hukumnya.

c. Syarat Ekonomis

Pada pokoknya pemungutan pajak merupakan alat bagi pemerintah untuk melaksanakan politik perekonomian suatu negara. Sehingga dalam pelaksanaan pemungutan pajak harus tetap terjaga keseimbangan kehidupan ekonomi. Syarat ekonomis ini sejalan dengan fungsi mengatur, oleh karenanya pemungutan pajak diusahakan tidak menghambat usaha rakyat dan membantu dalam menciptakan pemerataan pendapatan nasional.

d. Syarat Finansial

Bahwa pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk menutup sebagian pengeluaran negara.

4.7. Pajak Daerah

Pajak merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah disamping retribusi daerah. Pengertian pajak menurut M. Suparmoko dirumuskan sebagai berikut pajak adalah pembayaran iuran oleh rakyat kepada pemerintah, yang dapat dipaksakan dengan tanpa balas jasa yang secara langsung dapat ditunjuk. Misalnya pajak kendaraan bermotor, pajak penghasilan.

Pengaturan lebih lanjut dikeluarkan melalui sumber-sumber pendapatan daerah, khususnya mengenai pajak daerah (Undang-Undang Darurat No.11 tahun 1957). Inti dari UU No 11 Tahun 1957 tersebut menjelaskan tentang peraturan umum pajak daerah dan menyebutkan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Pengertian dari pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum politik.
- b. Mengadakan, mengubah, dan meniadakan pajak daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
- c. Lapangan pajak daerah adalah lapangan pajak yang belum digunakan oleh negara. Lapangan pajak tingkat bawahan adalah lapangan pajak yang belum digunakan oleh negara atau daerah tingkat atasan.
- d. Apabila suatu daerah tingkat atasan telah menggunakan suatu lapangan pajak, daerah tingkat bawahannya tidak dipekenankan memasuki lapangan pajak itu, akan tetapi dalam peraturan pajak tingkat atasan itu dapat ditentukan bahwa daerah tingkat bawahannya dipekenankan memungut opsen atas pajak daerah tingkat atasannya

4.8. Pajak-Pajak Daerah di Indonesia

Mengenai pajak daerah dapat dibedakan menjadi dua yaitu pajak daerah tingkat I dan pajak daerah tingkat II.

- **Pajak Daerah Tingkat I (Propinsi)**

Berdasarkan UU No. 34 tahun 2000 disebutkan bahwa pajak daerah yang dapat dipungut oleh daerah tingkat I antara lain :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- d. Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

- **Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten)**

Sedangkan menurut UU No. 34 tahun 2000 disebutkan bahwa pajak daerah yang dapat dipungut oleh Daerah Tingkat II, antara lain:

- a. Pajak Hotel dan Restoran
- b. Pajak Hiburan
- c. Pajak Reklame
- d. Pajak Penerangan Jalan
- e. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
- f. Pajak Parkir

4.9. Azas Pemungutan pajak Daerah

Azas pemungutan pajak daerah sebagai berikut:

- a. Harus ada kepastian hukum
- b. Pemungutan pajak daerah tidak boleh diborong
- c. Masalah pajak harus jelas
- d. Barang-barang keperluan hidup sehari-hari tidak boleh langsung dikenakan pajak daerah dan memberikan keistimewaan yang menguntungkan kepada seseorang atau golongan. Duta dan konsulat asing tidak boleh dibebankan kecuali dengan keputusan presiden.

Pemungutan pajak daerah selain didasarkan dan dilaksanakan menurut asas-asas dan norma-norma hukum, juga perlu diperhatikan bahwa prinsip bagi pengenaan pajak yang baik kepada wajib pajak. Prinsip-prinsip tersebut yaitu:

a. Prinsip kesamaan

Artinya bahwa beban pajak harus sesuai dengan kemampuan relatif dari setiap wajib pajak. Perbedaan dalam tingkat penghasilan harus digunakan sebagai dasar di dalam retribusi beban pajak itu, sehingga bukan beban pajak dalam arti uang yang penting tetapi baban riil dalam arti kepuasan yang hilang.

b. Prinsip kepastian

Pajak jangan sampai membuat rumit bagi wajib pajak, sehingga mudah di mengerti oleh mereka dan juga akan memudahkan administrasi pemerintah sendiri.

c. Prinsip kecocokan

Pajak jangan sampai menekan bagi wajib pajak, sehingga wajib pajak akan dengan suka dan senang hati melakukan pembayaran pajak kepada pemerintah.

4.10. Tolak Ukur Penilaian Suatu Pajak Daerah

Untuk menilai berbagai pajak daerah yang ada sekarang ini dapat menggunakan berbagai ukuran, yaitu :

- Pertama, Hasil (*Yield*)

Memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitannya dengan berbagai layanan yang dibiayainya, stabilitas dan elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk dan juga perbandingan hasil pajak dengan biaya pemungutan.

- Kedua, Keadilan (*equity*)

Dasar pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak sewenang-wenang. Pajak bersangkutan harus adil dan secara horisontal, artinya beban pajak haruslah sama antar berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama. Kemudian harus adil secara vertikal, artinya kelompok yang memiliki sumber daya ekonomi yang lebih besar memberikan sumbangan yang lebih besar dari pada kelompok yang lebih banyak memiliki sumber daya ekonomi. Pajak harus adil dari tempat ke tempat dalam arti, hendaknya tidak ada perbedaan-perbedaan besar dan sewenang-wenang dalam beban pajak dari daerah ke daerah lain,

kecuali jika perbedaan ini mencerminkan perbedaan dalam cara menyediakan layanan masyarakat.

- **Ketiga, Daya Guna Ekonomi (*economic Efficiency*)**

Pajak hendaknya mendorong penggunaan sumber daya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi, mencegah jangan sampai dilihat konsumen dan pilihan produsen menjadi salah arah atau orang menjadi segan bekerja atau menabung dan memperkecil beban lebih dari pajak.

- **Keempat, Kecocokan Sebagai Sumber Penerimaan Daerah (*suitability as a revenue source*)**

Dalam hal ini berarti, harus jelas kepada daerah mana suatu pajak haruslah dibayarkan dan tempat pemungutan pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak, pajak tidak mudah dihindari dengan cara memindahkan objek pajak dari suatu daerah ke daerah lain. Pajak daerah hendaknya jangan mempertajam perbedaan antara daerah dari segi ekonomi masing-masing, dan pajak hendaknya tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari kemampuan tata usaha pajak daerah.

4.11. Pajak Hotel dan Restoran

Sesuai dengan peraturan pemerintah No. 62 tahun 2001 pengertian pajak Hotel dan Restoran adalah :

Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan fasilitas lainnya dengan

dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

Retoran adalah tempat menyantap makanan minuman yang disediakan dengan di pungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa бага dan catering.

Berdasarkan Perda No.3 tahun 2003 tentang pajak hotel dan Perda No. 4 tahun 2003 tentang restoran dijelaskan mengenai nama, objek, dan subjek pajak hotel dan restoran.

1. Dengan nama pajak hotel, restoran dan usaha sejenis dipungut atas pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel, restoran dan usaha sejenis.
2. Subjek pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel, restoran dan usaha sejenis.
3. subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel, restoran dan usaha sejenis.

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel, restoran dan usaha sejenis. Tarif pajak hotel dan restoran ditetapkan 10% dari jumlah pembayaran yang dilakukan kepada pengusaha hotel, restoran dan usaha sejenis.

4.12. Hubungan Pajak hotel dan restoran Dengan Pendapatan Asli Daerah

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah dikategorikan dalam pendapatan rutin Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pendapatan Asli Daerah

merupakan suatu pendapatan yang menunjukkan suatu kemampuan daerah menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan rutin maupun pembangunan. Jadi pengertian dari pendapatan asli daerah dapat dikatakan sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangan daerahnya untuk membiayai tugas dan tanggung jawabnya.

Dalam penjelasan UU No. 25 tahun 1999 diperbarui dengan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah menjelaskan bahwa :

Pembangunan daerah sebagai sebagian intergal dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan daerah menuju masyarakat madani yang bebas korupsi, kolusi, kolusi dan nepotisme. Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai sub sistem pemerintahan negara yang dimaksudkan untuk meningkatkan daya guma dan hasil guma penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan partisipasi masyarakat dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan, maka pemerintah suatu negara pada hakekatnya mengemban tugas dan fungsi utama yaitu fungsi alokasi yang

meliputi alokasi yang meliputi antara lain pendapatan dan kekayaan masyarakat, pemerataan pembangunan, dan fungsi stabilitas yang meliputi antara lain, pertahanan dan keamanan, ekonomi dan moneter. Fungsi distribusi dan fungsi stabilitas pada umumnya lebih efektif dilaksanakan oleh pemerintah daerah, karena daerah pada umumnya lebih mengetahui kebutuhan serta standar pelayanan masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya perlu diperhatikan kondisi dan situasi yang berbeda-beda dari masing-masing wilayah. Dengan demikian pembagian ketiga fungsi dimaksudkan sangat penting sebagai landasan dalam menentukan dasar-dasar perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Untuk mendorong penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Sumber pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi dan pembantuan.

2. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan lain-lain Penerimaan yang sah. Sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dalam wilayah daerah yang bersangkutan, yang terdiri :

a. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pungutan daerah menurut peraturan daerah yang dipergunakan untuk membiayai urusan rumah tangga daerah sebagai badan hukum publik.

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau pekerjaan atau pelayanan pemerintah daerah dan jasa usaha milik daerah bagi yang berkepentingan atas jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung.

c. Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah

Bagian Badan Usaha Milik Daerah ialah bagian keuntungan atau laba bersih dari perusahaan daerah atas badan lain yang merupakan badan usaha milik daerah. Sedangkan perusahaan daerah adalah perusahaan yang modalnya sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Merupakan penerimaan selain yang disebutkan di atas tapi sah. Penerimaan ini mencakup sewa rumah dinas daerah, sewa gedung dan tanah milik daerah, jasa giro, hasil penjualan barang-barang bekas milik daerah dan penerimaan-penerimaan lain yang sah menurut Undang-Undang.

Pajak hotel dan restoran merupakan bagian dari pajak daerah, yang mana kesemuanya terdapat dalam Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan asli Daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah yang bersangkutan.

Pajak hotel dan restoran sebagai salah satu penyumbang pendapatan daerah sangat potensi untuk ditingkatkan mengingat peran pajak hotel dan restoran ini dalam peningkatan PAD. Pajak hotel dan restoran bisa terus diupayakan dan dimaksimalkan pemungutannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ini diharapkan akan memperlancar jalannya pembangunan dan pemerintahan. Bila pembangunan bisa berjalan dengan lancar maka kesejahteraan masyarakat juga diharapkan akan meningkat. Dengan diketahuinya pengaruh pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah maka upaya peningkatan pajak hotel dan restoran untuk menambah keuangan daerah harus dilanjutkan dan lebih ditingkatkan.

4.13. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian adalah suatu kesimpulan awal yang masih bersifat sementara. Hipotesis ini digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah hotel dan restoran, tingkat inflai, jumlah wisatawan nusantara, secara simultan berpengaruh terhadap peningkatan realisasi pajak hotel dan restoran. Secara persial pengaruh variabel-variabel tersebut dihipotesiskan sebagai berikut :

1. Diduga Jumlah hotel dan restoran berpengaruh positif signifikan terhadap realisasi pajak hotel dan restoran.
2. Diduga Tingkat inflasi berpengaruh positif terhadap realisasi pajak hotel dan restoran.
3. Diduga Jumlah wisatawan nusantara positif signifikan terhadap realisasi pajak hotel dan restoran.
4. Diduga Jumlah hotel dan restoran, tingkat inflasi dan jumlah wisatawan nusantara berpengaruh signifikan terhadap realisasi pajak hotel dan restoran.

BAB V

METODE PENELITIAN

5.1. Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

Studi ini digunakan sebagai landasan teori yang akan digunakan dalam menganalisis kasus. Dasar-dasar ini diperoleh dari buku, literatur-literatur maupun tulisan-tulisan yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Wawancara

Peneliti juga akan menggunakan teknik wawancara dalam pengumpulan data dimana penulis mengadakan tanya jawab secara langsung ke pihak yang berwenang.

5.2. Analisis Data

a) Analisis Kontribusi

Yaitu suatu alat analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak Hotel dan Restoran terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Purworejo, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap PAD. Rumus yang digunakan untuk menghitung Kontribusi sebagai berikut: (Nugroho Budiyuwono, 1995: 160).

$$P_n = \frac{OX_n}{QY_n} \times 100\%$$

Keterangan :

P_n = Kontribusi penerimaan pajak Hotel dan Restoran terhadap pendapatan asli daerah (Rupiah)

QY = Jumlah penerimaan pendapatan asli daerah (Rupiah)

QX = Jumlah penerimaan pajak Hotel dan Restoran (Rupiah)

n = Tahun (periode) tertentu.

Dengan analisis ini kita akan mendapatkan seberapa besar kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Purworejo. Dengan membandingkan hasil analisis tersebut dari tahun ke tahun selama lima belas tahun kita akan mendapatkan hasil analisis yang berfluktuasi dari kontribusi tersebut dan akan diketahui kontribusi yang terbesar dan yang terkecil dari tahun ke tahun. Sehingga dapat diketahui seberapa besar peran pajak hotel dan restoran dalam menyumbang kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purworejo.

b) Analisis Efektifitas

Yaitu merupakan hubungan antara realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap target penerimaan pajak hotel dan restoran yang memungkinkan apakah besarnya pajak hotel dan restoran sesuai dengan target yang ada. Besarnya efektifitas pajak

dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: (Nick Devas, 1989 : 146)

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran}}{\text{Target penerimaan pajak hotel dan restoran}} \times 100\%$$

Apabila hasil perhitungan efektifitas pajak hotel dan restoran menghasilkan angka/persentase mendekati 100 % maka pajak hotel dan restoran semakin efektif, dan untuk melihat efektifitasnya dengan membandingkan efektifitas tahun bersangkutan dengan efektifitas tahun sebelumnya.

c) Analisis Efisiensi

Yaitu penerimaan pajak daerah berhubungan dengan besarnya biaya pemugutan yang dikeluarkan terhadap realisasi penerimaan. Besarnya efisiensi pajak hotel dan restoran dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: (Nick Devas, 1989 : 146)

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya pemungutan pajak hotel dan restoran}}{\text{Realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran}} \times 100\%$$

Apabila hasil dari perhitungan efisiensi menghasilkan angka/persentase yang semakin kecil maka pajak hotel dan restoran semakin efisien.

d) Analisis Regresi

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel independent dengan variabel dependen, dimana dalam penelitian ini penulis menggunakan 3 variabel. Hubungan antara variabel-variabel tersebut berbentuk linear atau secara inherent linear. Bentuk yang tidak linier tetapi secara inherent linear. Bentuk yang tidak linear tetapi secara inherent liniear adalah bentuk hubungan variabel yang tidak linear tetapi dapat ditransformasikan atau diubah menjadi hubungan yang bersifat linear (Soelisryo, pengantar ekonometrika I, BPFE, Yogyakarta, hal 235-236).

Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = f(X1, X2, X3)$$

Keterangan :

Y = Realisasi Pajak Hotel dan Restoran (Rupiah).

X1 = Jumlah Hotel dan Restoran (unit)

X2 = Tingkat inflasi (persen)

X3 = Jumlah wisatawan Nusantara (orang)

Model regresi berganda dan agar tercapai tujuan dari penelitian, maka bentuk persamaan yang digunakan adalah persamaan bentuk linier, persamaan bentuk linier dari gambar sketer plot (dengan satuan gambar) berbentuk juga linier.

$$\text{RPHR} = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e_i$$

Keterangan :

RPHR = Realisasi Pajak Hotel dan Restoran (Rupiah)

a = Konstanta

b_1, b_2, b_3 = Koefisien regresi

e_i = Variabel pengganggu

X_1 = Jumlah hotel dan restoran (unit)

X_2 = Tingkat inflasi (persen)

X_3 = Jumlah wisatawan nusantara (orang)

Dari analisis regresi linier berganda maka akan diperoleh koefisien regresi linier dari masing-masing variabel. Untuk menguji setiap koefisien regresi yang diperoleh dengan bantuan analisis E-views. pengujian koefisien Regresi secara Individual (t-test) dan secara (F-test).

- Uji t-Statistik (metode Pengujian Parsial)

Dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara individual terhadap variabel tidak bebas. Dengan menganggap variabel bebas (independen) lainnya konstan. Kesimpulan hasil uji t dilakukan dengan uji t dapat dilakukan dengan melihat hasil output regresi yang dilakukan E-views dimana jika Probabilitas masing-masing $< 5\%$ (0.05) berarti signifikan begitu juga sebaliknya jika probabilitas $> 5\%$ (0.05) berarti tidak signifikan atau apabila $< 5\%$ berarti secara terpisah

variabel-variabel tersebut dapat mempengaruhi variabel dependen.

Hipotesis yang digunakan :

$H_0 : \beta_i < 0$, maka variabel independen tidak berpengaruh secara nyata terhadap variabel dependen, H_0 ditolak.

$H_a : \beta_i > 0$, maka variabel independen berpengaruh secara nyata terhadap variabel dependen, H_a diterima.

Pengujian ini dilakukan dengan rumus dari (Gujarati 1995, 124) sebagai berikut :

$$t \text{ hitung} = \frac{\beta_i - \beta_i^*}{SE(\beta_i)}$$

Keterangan :

β_i = Parameter yang diestimasi

β_i^* = Nilai hipotesis dari ($H_0: \beta_i = \beta_i^*$)

$SE(\beta_i)$ = Simpangan baku β_i

Bila $t \text{ hitung} > t \text{ tabel} (\alpha = n - k)$ maka H_0 ditolak, berarti tiap-tiap variabel independen berpengaruh nyata terhadap variabel dependen.

Bila $t \text{ hitung} < t \text{ tabel} (1/2 \alpha = n - k)$ maka H_0 diterima, berarti tiap-tiap variabel tidak berpengaruh secara nyata terhadap variabel devenden.

- Uji F statistik (Metode Pengujian Simultan)

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara keseluruhan signifikan secara statistik dalam mempengaruhi variabel dependen apabila nilai Probabilitas (F-statistik) < dari alpha 0,05 maka variabel-variabel independen secara keseluruhan atau secara bersama-sama variabel tersebut berpengaruh terhadap variabel dependen. Nilai F dirumuskan sebagai berikut.

$$F = \frac{R^2 / (k)}{(1-R^2) (n-k-1)}$$

Keterangan :

R^2 = Koefisien determinasi

K = Jumlah parameter yang diestimasi termasuk konstanta

n = Jumlah sampel

- Koefisien Determinasi R^2

Nilai R^2 menunjukkan besarnya variasi variabel-variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen. Nilai R^2 berarti semakin besar variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel-variabel independen. Sedangkan semakin kecil nilai R^2 berarti semakin kecil variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel-variabel independen. Informasi yang dapat diperoleh dari koefisien

determinasi R^2 adalah untuk mengetahui seberapa besar variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel dependen.

Sifat dari koefisien determinasi ini adalah:

- R^2 merupakan besarnya non negatif
- Batasannya adalah $0 < R^2 < 1$(Damodar Gujarati)

Apabila R^2 bernilai 0 berarti tidak ada hubungan antara variabel-variabel independen dengan variabel yang dijelaskan. Semakin besar nilai R^2 menggambarkan semakin tepat garis regresi dalam menggambarkan nilai-nilai observasi. Tingkat R^2 tinggi jika nilainya antara 0,4 sampai 0,6 untuk penelitian bidang sosial.

- Uji asumsi klasik

Pengujian asumsi klasik dilakukan untuk melihat model yang diteliti mengalami penyimpangan klasik atau tidak, sehingga pemeriksaan penyimpangan terhadap asumsi klasik ini perlu dilakukan. Asumsi klasik yang dipakai untuk membentuk model adalah uji multikolinieritas, uji autokorelasi, uji heterokedastisitas.

- Pengujian multikolinieritas

Adalah suatu keadaan dimana satu atau lebih variabel independen dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari variabel independen lainnya untuk meregresi tiap variabel independen terhadap variabel independen

lainnya. Multikolinieritas ini koefisien regresinya tak tentu dan kesalahan standarnya tak terhingga. Jika kolinieritas tingkat tinggi tetapi tidak sempurna, penafsiran koefisien regresi adalah mungkin tetapi kesalahan standarnya cenderung untuk besar, sehingga hasilnya nilai populasi dari koefisien tidak dapat ditaksir dengan tepat. Cara melakukan deteksi terhadap multikolinieritas pada penelitian ini dilakukan dengan uji korelasi, dimana apabila dalam hasil uji korelasi hasilnya $< 0,9$ maka terdapat multikolinieritas.

➤ Pengujian heteroskedastisitas

Suatu asumsi dari model regresi linier klasik adalah bahwa gangguan semuanya mempunyai varian yang sama, jika asumsi ini tidak terpenuhi akan terjadi heterokedasitas atau dalam kata lain salah satu penyimpangan dalam asumsi klasik, dimana kondisi tertentu tiap (disturbance) mengandung varian yang tidak konstan. Pengujian heterokedastisitas dalam penelitian ini menggunakan Uji Park, dimana apabila dalam hasil Uji Park tersebut Probabilitas $< 0,05$ maka terdapat heterokedasitas dan sebaliknya jika probabilitas $> 0,05$ maka terdapat heterokedasitas.

➤ Pengujian autokorelasi

Suatu model regresi yang mengalami gejala autokorelasi berarti telah terjadi korelasi antara observasi-observasi pada suatu tempat dan pada suatu waktu. Untuk mengetahui apakah suatu model regresi mengalami gejala autokorelasi atau tidak dapat dilakukan dengan menggunakan Uji Serial LM Test. Untuk mengetahui adanya autokorelasi perlu dilakukan perbaikan, tergantung pada sifat ketergantungan diantara gangguan (e_i), tetapi karena gangguan tidak bisa diamati, praktek yang biasa dilakukan adalah dengan mengansumsikan bahwa gangguan tadi ditimbulkan oleh mekanisme yang masuk akal.

Dalam penelitian ini pengujian Autokorelasi dengan menggunakan Uji Serial LM test, dimana jika hasil uji probabilitas $< 0,05$ maka terdapat autokorelasi dan sebaliknya jika dalam hasil uji probalitasnya $> 0,05$ maka tidak terdapat autokorelasi.

5.3. Data-Data dan Sumber Data

Data yang termasuk variabel dependen (terikat) yakni realisasi pajak hotel dan restoran, pajak hotel dan restoran dalam satuan rupiah. Data ini didapat dari

laporan terget dan realisasi penerimaan PAD dalam kurun waktu 1989/1990-2003.

Keterangan tabel 5.1. :

Tahun anggaran 1989/1990-1998/1999 berjalan dari tanggal 1 April – 31 Maret (12 bulan). Tahun 1999/2000 hanya 9 bulan di mulai dari 1 April 1999– 31 Desember 2000. Tahun anggaran 2000-2003 dimulai dari 1 januari – 31 Desember (1 tahun).

Tabel 5.1
Penerimaan Pajak Hotel Restoran dan Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Purworejo Tahun 1989/1990–2003

Tahun Anggaran	Target pajak Hotel dan Restoran (Rp)	Realisasi Pajak Hotel dan Restoran (Rp)	Pendapatan Asli Daerah (Rp)
1989/1990	17.000.000	18.333.751	2.193.232.546
1990/1991	20.000.000	21.104.673	2.522.405.166
1991/1992	23.000.000	23.244.541	2.914.366.412
1992/1993	25.000.000	25.215.233	3.486.403.214
1993/1994	28.000.000	28.567.098	4.586.042.314
1994/1995	29.000.000	32.336.722	4.733.120.305
1995/1996	32.000.000	33.129.555	5.607.523.276
1996/1997	33.500.000	33.648.149	5.729.748.934
1997/1998	50.000.000	50.832.054	7.549.908.608
1998/1999	51.000.000	51.015.474	7.836.030.435
1999/2000	55.000.000	55.615.474	6.241.994.048
2000	150.000.000	153.898.124	8.818.818.074
2001	155.000.000	155.432.241	15.253.704.832
2002	166.000.000	166.105.100	20.914.955.409
2003	195.000.000	200.157.000	24.492.030.536

Sumber: Dipekda Kabupaten Purworejo

Data variabel independen (bebas) yang pertama yaitu Jumlah Hotel dan Restoran di Kabupaten Purworejo tahun 1989/1991-2003. data ini diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Purworejo.

Tabel 5.2
Jumlah Hotel dan Restoran di Kabupaten
Purworejo Tahun 1989/1990-2003

Tahun	Jumlah Hotel dan Restoran (unit)
1989/1990	90
1990/1991	111
1991/1992	144
1992/1993	168
1993/1994	190
1994/1995	199
1995/1996	234
1996/1997	253
1997/1998	267
1998/1999	244
1999/2000	279
2000	281
2001	299
2002	300
2003	334

Sumber: Dipenda kahupaten Purworejo

Data variabel independen (bebas) yang kedua yaitu Jumlah wisatawan nusantara di Kabupaten Purworejo dari tahun 1989/1990-2003. Data ini diperoleh dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Purworejo.

Tabel 5.3
Jumlah Wisatawan Nusantara di Kabupaten Purworejo
Tahun 1989/1990-2003

Tahun	Jumlah wisatawan Nusantara (orang)
1989/1990	10.204
1990/1991	10.810
1991/1992	14.512
1992/1993	10.777
1993/1994	50.555
1994/1995	65.425
1995/1996	78.665
1996/1997	101.572
1997/1998	177.564
1998/1999	200.256
1999/2000	202.018
2000	152.365
2001	101.805
2002	125.615
2003	144.777

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Purworejo

Data variabel independen (bebas) yang ketiga yaitu Laju inflasi di Kabupaten Purworejo tahun 1989/1990-2003. Data ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo.

Tabel 5.4
Laju Inflasi di Kabupaten Purworejo
Tahun 1989/1990-2003

Tahun	Tingkat inflasi (%)
1989/1990	10,73
1990/1991	8,38
1991/1992	4,40
1992/1993	10,01
1993/1994	8,42
1994/1995	9,48
1995/1996	7,20
1996/1997	8,09
1997/1998	4,09
1998/1999	10,74
1999/2000	4,16
2000	8,42
2001	15,97
2002	10,97
2003	3,21

Sumber: BPS Kabupatn Purworejo

BAB VI

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

6.1. Analisis Deskripsi Data

Analisis ini merupakan suatu metode dengan cara mendeskripsikan faktor-faktor yang berhubungan dengan permasalahan yang dimaksud yaitu untuk pendeskripsian pengaruh realisasi pajak hotel dan restoran terhadap PAD di Kabupaten Purworejo, hal ini sebagai pendukung kuantitatif. Penelitian ini berkaitan dengan seberapa besar pajak hotel dan restoran di Kabupaten Purworejo yang dipengaruhi oleh faktor jumlah hotel dan restoran, tingkat inflasi, jumlah wisatawan. Data tersebut dapat dilihat pada tabel 6.1. seperti dibawah ini :

1. Perkembangan Realisasi Pajak hotel dan restoran

Dari tahun ke tahun pajak hotel dan restoran semakin meningkat di kabupaten Purworejo, hal ini disebabkan oleh semakin banyaknya hotel dan restoran dan ditambah semakin banyak hotel dan restoran yang mau membayar pajak dan ini dapat dilihat bahwa tahun 2003 saja pajak hotel dan restoran telah mencapai Rp 24.492.030.536,00 dari pada tahun 2002 yang hanya Rp 20.914.955.409,00.

2. Jumlah Hotel dan Restoran

Perkembangan hotel dan restoran di Kabupaten Purworejo dari tahun ke tahun semakin menunjukkan angka yang signifikan, hal ini disebabkan oleh semakin berkembangnya kota sekaligus semakin besarnya mobilitas masyarakatnya yang membutuhkan hotel dan restoran.

3. Tingkat Inflasi

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam kurun waktu tertentu, inflasi di Kabuapten Purworejo pada tahun 2003 sebesar 3,21 % ini lebih kecil dari pada tahun 2002 yang mencapai 10,97 %.

4. Jumlah Wisatawan

Jumlah wisatawan yang berkunjung di objek-objek wisata di Kabupaten Purworejo dari tahun ke tahun semakin meningkat hal ini di sebabkan oleh semakin banyak objek wisata yang dibuka. Tahun 2003 saja jumlah wisatawan yang membeli tiket objek wisata sebanyak 144.777 orang.

Tabel 6.1
Realisasi Pajak Hotel dan Restoran, Jumlah Hotel dan Restoran, Inflasi,
Jumlah Wisatawan Nusantara di Kabupaten Purworejo
Tahun 1989/1990-2003

Tahun Anggaran	Realisasi Pajak Hotel Restoran (Rp)	Jumlah Hotel Restoran (unit)	Tingkat Inflasi (%)	Jumlah Wisatawan Nusantara (orang)
1989/1990	2.193.232.546	90	10,73	10.204
1990/1991	2.522.405.166	111	8,38	10.810
1991/1992	2.914.366.412	144	4,40	14.512
1992/1993	3.486.403.214	168	10,01	10.777
1993/1994	4.586.042.314	190	8,42	50.555
1994/1995	4.733.120.305	199	9,48	65.425
1995/1996	5.607.523.276	234	7,20	78.665
1996/1997	5.729.748.934	253	8,09	101.572
1997/1998	7.549.908.608	267	4,09	177.564
1998/1999	7.836.030.435	244	10,74	200.256
1999/2000	6.241.994.048	279	4,16	202.018
2000	8.818.818.074	281	8,42	152.365
2001	15.253.704.832	299	15,97	101.805
2002	20.914.955.409	300	10,97	125.615
2003	24.492.030.536	334	3,21	144.777

Sumber: Dipenda, Dinas kebudayaan dan pariwisata, Badan Pusat Statistik Purworejo

Keterangan :

Tahun anggaran 1989/1990-1998/1999 berjalan dari tanggal 1 April – 31 Maret (12 bulan). Tahun 1999/2000 hanya 9 bulan di mulai dari 1 April 1999– 31 Desember 2000. Tahun anggaran 2000-2003 dimulai dari 1 januari – 31 Desember.(1 tahun).

6.2. Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap PAD

Kontribusi pajak hotel dan restoraan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Purworejo dihitung dengan membandingkan jumlah penerimaan pajak hotel dan restoran dengan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah. Besarnya kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Purworejo dapat dilihat pada tabel 6.2.

Tabel 6.2.
Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 1989/1990-2003

Tahun anggaran	Realisasi pajak Hotel dan Restoran (Rp)	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Kontribusi (%)
1989/1990	18.333.751	2.193.232.546	8.35
1990/1991	21. 104.673	2.522.405.166	0.83
1991/1992	23.244.541	2.914.366.412	7.97
1992/1993	25.215.233	3.486.403.214	0.72
1993/1994	28 567.098	4.586.042.314	0.62
1994/1995	32.336.722	4.733.120.305	0.68
1995/1996	33.129.555	5.607.523.276	0.59
1996/1997	33.648.149	5.729.748.934	0.58
1997/1998	50.832.054	7.549.908.608	0.67
1998/1999	51.015.474	7.836.030.435	0.65
1999/2000	55.615.474	6.241.994.048	0.89
2000	153.898.124	8.818.818.074	1.74
2001	155.432.241	15.253.704.832	1.01
2002	166.105.100	20.914.955.409	0.76
2003	200.157.000	24.492.030.536	0.81
rata-rata			1.79

Sumber : Dipenda Kabupaten Purworejo

Kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Purworejo di hitung dengan rumus sebagai berikut :

$$P_n = \frac{QX_n}{QY_n} \times 100 \%$$

Keterangan :

P_n = Kontribusi penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah (rupiah)

QY = Penerimaan pendapatan asli daerah (rupiah)

QX = Penerimaan pajak hotel dan restoran (rupiah)

n = Tahun (periode) tertentu.

$$\text{Tahun 1989/1990} = \frac{18.333.751}{2.193.232.546} \times 100\% = 0.83 \%$$

$$\text{Tahun 1990/1991} = \frac{21.104.674}{2.522.405.166} \times 100\% = 0.83 \%$$

$$\text{Tahun 1991/1992} = \frac{23.244.541}{2.914.366.412} \times 100\% = 7.97 \%$$

$$\text{Tahun 1992/1993} = \frac{25.215.233}{3.486.403.214} \times 100\% = 0.72 \%$$

$$\text{Tahun 1993/1994} = \frac{28.567.098}{4.586.042.314} \times 100\% = 0.62 \%$$

$$\text{Tahun 1994/1995} = \frac{32.336.722}{4.733.120.305} \times 100\% = 0.68 \%$$

$$\text{Tahun 1995/1996} = \frac{33.129.555}{5.607.523.276} \times 100\% = 0.59 \%$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 1996/1997} &= \frac{33.648.149}{5.729.748.932} \times 100\% = 0.58\% \\ \text{Tahun 1997/1998} &= \frac{50.832.054}{7.549.908.608} \times 100\% = 0.67\% \\ \text{Tahun 1998/1999} &= \frac{51.015.474}{7.836.030.435} \times 100\% = 0.65\% \\ \text{Tahun 1999/2000} &= \frac{55.615.474}{6.241.994.048} \times 100\% = 0.89\% \\ \text{Tahun 2000} &= \frac{153.898.124}{8.818.818.078} \times 100\% = 1.74\% \\ \text{Tahun 2001} &= \frac{155.432.241}{15.253.704.832} \times 100\% = 1.01\% \\ \text{Tahun 2002} &= \frac{166.105.100}{20.914.955.409} \times 100\% = 0.79\% \\ \text{Tahun 2003} &= \frac{200.157.000}{24.492.030.536} \times 100\% = 0.81\% \end{aligned}$$

Dari perhitungan tabel diatas dapat dilihat bahwa kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Purworejo pada tahun anggaran 1989/1990 - 2003 bervariasi antara 0.58% sampai dengan 1.74% atau dengan rata-rata setiap tahunnya 1.79%. Naik turunnya kontribusi pajak hotel dan restoran dikarenakan banyak tidaknya kunjungan ke hotel dan restoran. Kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2000 yaitu sebesar 8.35% dan terendah pada tahun anggaran 1996/1997 yaitu sebesar 0.58%. Pada tahun 1990/1991 sumbangan yang diberikan pajak hotel dan restoran terhadap PAD sebesar 0.83%, sedang pada tahun 1991/1992 naik menjadi 7.97% atau mengalami

kenaikan sebesar 7.14%. Kemudian pada tahun 1992/1993 pajak hotel dan restoran memberikan kontribusi sebesar 0.72%, tahun 1993/1994 turun menjadi 0.62%, dan tahun 1994/1995 naik sebesar 0.68%.

Pada tahun 1995/1996 kontribusi pajak hotel dan restoran sebesar 0.59%, tahun 1997/1998 kontribusi pajak hotel dan restoran naik sebesar 0.67%, tahun 1998/1999 kontribusi pajak hotel dan restoran turun sebesar 0.65% dan tahun 1999/2000 naik sebesar 0.89%. Sedangkan pada tahun 2000 naik menjadi 1.74%, sedangkan pada tahun 2001 naik lagi sebesar 1.01%. kemudian pada tahun 2002 pajak hotel dan restoran turun menjadi 0.79% dan tahun 2003 naik menjadi 0.81% atau naik sebesar 0.02%. Dari rata-rata yang mencapai 1,79% menunjukkan besarnya kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah yang mencapai lebih dari 1 % merupakan suatu yang sangat baik.

6.3. Efektifitas Pajak Hotel dan Restoran

Tingkat efektifitas pajak hotel dan restoran di Kabupaten Purworejo dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran dengan target pajak hotel dan restoran. Apabila perhitungan efektifitas pajak hotel dan restoran menghasilkan angka atau persentase mendekati atau melebihi 100%, maka pajak hotel dan restoran semakin efektif atau dengan kata lain kinerja pemungutan pajak hotel dan restoran Kabupaten Purworejo semakin baik. Dalam penelitian ini yang dipertimbangkan dalam menentukan efektifitas hanya pencapaian target. Sedangkan untuk tujuan lain, seperti keadilan, ketepatan waktu pembayaran, dan kepastian hukum diabaikan. Dibawah ini disajikan tabel

hasil perhitungan efektifitas pajak hotel dan restoran Kabupaten purworejo tahun anggaran 1989/1990 – 2003.

Tabel 6.3.
Efektivitas Pajak Hotel dan Restoran
Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 1989/1990 – 2003

Tahun Anggaran	Target Pajak Hotel Restoran (Rp)	Realisasi Pajak Hotel Restoran (Rp)	Efektifitas Pajak Hotel Restoran (%)
1989/1990	17.000.000	2.193.232.546	107.84
1990/1991	20.000.000	2.522.405.166	105.52
1991/1992	23.000.000	2.914.366.412	101.06
1992/1993	25.000.000	3.486.403.214	100.86
1993/1994	28.000.000	4.586.042.314	102.02
1994/1995	29.000.000	4.733.120.305	101.05
1995/1996	32.000.000	5.607.523.276	103.52
1996/1997	33.500.000	5.729.748.934	100.44
1997/1998	50.000.000	7.549.908.608	101.66
1998/1999	51.000.000	7.836.030.435	100.03
1999/2000	55.000.000	6.241.994.048	101.11
2000	150.000.000	8.818.818.074	102.52
2001	155.000.000	15.253.704.832	100.27
2002	166.000.000	20.914.955.409	100.06
2003	195.000.000	24.492.030.536	102.64
rata-rata			102.04

Sumber: *Dipenda Kabupaten Purworejo*

Tingkat efektifitas pajak hotel dan restoran Kabupaten Purworejo dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran}}{\text{target penerimaan pajak hiburan}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 1989/1990} = \frac{18.333.751}{17.000.000} \times 100\% = 107.84\%$$

$$\text{Tahun 1990/1991} = \frac{21.104.673}{20.000.000} \times 100\% = 105.52\%$$

$$\text{Tahun 1991/1992} = \frac{23.244.541}{23.000.000} \times 100\% = 101.06\%$$

$$\text{Tahun 1992/1993} = \frac{25.215.233}{25.000.000} \times 100\% = 100.86\%$$

$$\text{Tahun 1993/1994} = \frac{28.567.098}{28.000.000} \times 100\% = 102.02\%$$

$$\text{Tahun 1994/1995} = \frac{32.336.722}{32.000.000} \times 100\% = 101.05\%$$

$$\text{Tahun 1995/1996} = \frac{33.129.555}{32.000.000} \times 100\% = 103.52\%$$

$$\text{Tahun 1996/1997} = \frac{33.648.149}{33.500.000} \times 100\% = 100.44\%$$

$$\text{Tahun 1997/1998} = \frac{50.832.052}{50.000.000} \times 100\% = 101.66\%$$

$$\text{Tahun 1998/1999} = \frac{51.015.474}{51.000.000} \times 100\% = 100.03\%$$

$$\text{Tahun 1999/2000} = \frac{55.615.474}{55.000.000} \times 100\% = 101.11\%$$

$$\text{Tahun 2000} = \frac{153.898.124}{150.000.000} \times 100\% = 102.59\%$$

$$\text{Tahun 2001} = \frac{155.432.241}{155.000.000} \times 100\% = 100.27\%$$

$$\text{Tahun 2002} = \frac{166.105.100}{166.000.000} \times 100\% = 100.06\%$$

$$\text{Tahun 2003} = \frac{200.157.000}{195.000.000} \times 100\% = 102.64\%$$

Dari hasil perhitungan di atas dapat dilihat bahwa tingkat efektifitas pajak hotel dan restoran Kabupaten Purworejo pada tahun anggaran 1989/1990–2003 cenderung menurun yaitu antara 107.84%–100.03% atau dengan rata-rata 102.04%. Pada tahun 1989/1990 efektifitas pajak hotel dan restoran Kabupaten Purworejo sebesar 107.84% dan merupakan efektifitas tertinggi selama kurun waktu 1989/1990-2003 sedang pada tahun 1990/1991 tingkat efektifitas mengalami penurunan sebesar 105.52%. Kemudian tahun 1991/1992 juga mengalami penurunan sebesar 101.06%, dan mengalami penurunan lagi pada tahun 1992/1993 sebesar 100.86%. Tapi pada tahun 1993/1994 mengalami kenaikan sebesar 102.02%, tahun 1994/1995 mengalami penurunan sebesar 101.05% dan tahun 1995/1996 efektifitas naik sebesar 103.52%.

Sedang pada tahun 1996/1997 efektifitas mengalami penurunan sebesar 100.44%, tahun 1997/1998 efektifitas kembali mengalami kenaikan sebesar 101.66%, tahun 1998/1999 efektifitas turun menjadi 100.03% dan merupakan tingkat efektifitas terendah selama lima belas tahun. Kemudian di tahun 1999/2000 efektifitas naik menjadi 101.11%, naik lagi di tahun 2000 sebesar 102.52% dan mengalami penurunan pada tahun 2001 sebesar 100.27%. Di tahun 2002 efektifitas semakin turun menjadi 100.06% kemudian di tahun 2003 naik menjadi 102.64%.

Dengan melihat rata-rata efektifitas pajak hotel dan restoran Kabupaten Purworejo yang melebihi 100% atau rata-rata sebesar 102.04% setiap tahunnya,

hal ini menunjukkan bahwa kinerja dalam pemungutan pajak hotel dan restoran Kabupaten Purworejo sangat baik. Karena realisasi pajak hotel dan restoran lebih besar dari pada target yang direncanakan.

6.4. Efisiensi Pajak Hotel dan Restoran

Efisiensi pajak hotel dan restoran dihitung dengan cara membandingkan antara biaya pemungutan pajak hotel dan restoran dengan realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran. Apabila hasil perhitungan mendekati angka persentase yang semakin kecil maka pajak hotel dan restoran semakin efisien atau dengan kata lain kinerja dalam pemungutan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Purworejo akan semakin baik.

Besarnya biaya pemungutan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Purworejo adalah 27,5% dari target pajak hotel dan restoran, jika bisa melebihi target akan diberi tambahan biaya jasa operasional sebesar 22,5% dari besarnya kelebihan penyeteroran. Keputusan tersebut diambil karena jumlah biaya pemungutan pajak hotel dan restoran tidak dapat dihitung secara rinci karena banyak biaya yang tidak dapat dinominalkan atau dikalkulasikan. Sehingga ketidaksesuaian antara biaya yang telah ditetapkan dengan biaya yang sesungguhnya diabaikan. Tingkat efisiensi pajak hotel dan restoran Kabupaten Purworejo dapat dilihat pada tabel 6.4.

Tabel 6.4
Efisiensi Pajak Hotel dan Restoran
Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 1989/1990 – 2003

Tahun Anggaran	Biaya Pemugutan (Rp)	Realisasi Pajak Hotel & Restoran (Rp)	Efisiensi Pajak Hotel & Restoran (%)
1989/1990	4.675.000	18.333.751	25.49
1990/1991	5.500.000	21.104.673	26.06
1991/1992	6.325.000	23.244.541	27.21
1992/1993	6.875.000	25.215.233	27.26
1993/1994	7.700.000	28.567.098	26.98
1994/1995	7.975.000	32.336.722	24.66
1995/1996	8.800.000	33.129.555	26.56
1996/1997	9.212.500	33.648.149	27.37
1997/1998	13.750.000	50.832.054	27.04
1998/1999	14.025.000	51.015.474	27.49
1999/2000	15.125.000	55.615.474	27.19
2000	41.250.000	153.898.124	26.80
2001	42.625.000	155.432.241	27.42
2002	45.650.000	166.105.100	27.48
2003	53.625.000	200.157.000	26.79

Sumber: *Dipenda Kabupaten Purworejo*

Tingkat efisiensi pajak hotel dan restoran Kabupaten Purworejo dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran}}{\text{Realisasi Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 1989/1990} = \frac{4.675.000}{18.333.751} \times 100\% = 25.49\%$$

$$\begin{aligned}
\text{Tahun 1990/1991} &= \frac{5.500.000}{21.104.675} \times 100\% = 26.06\% \\
\text{Tahun 1991/1992} &= \frac{6.325.000}{23.244.541} \times 100\% = 27.21\% \\
\text{Tahun 1992/1993} &= \frac{6.875.000}{25.215.233} \times 100\% = 27.26\% \\
\text{Tahun 1993/1994} &= \frac{7.700.000}{28.567.098} \times 100\% = 26.98\% \\
\text{Tahun 1994/1995} &= \frac{7.975.000}{32.336.722} \times 100\% = 24.66\% \\
\text{Tahun 1995/1996} &= \frac{8.800.000}{33.129.555} \times 100\% = 26.56\% \\
\text{Tahun 1996/1997} &= \frac{9.212.500}{33.648.149} \times 100\% = 27.37\% \\
\text{Tahun 1997/1998} &= \frac{13.750.000}{50.832.000} \times 100\% = 27.04\% \\
\text{Tahun 1998/1999} &= \frac{14.025.000}{51.015.474} \times 100\% = 27.49\% \\
\text{Tahun 1999/2000} &= \frac{15.125.000}{55.615.474} \times 100\% = 27.19\% \\
\text{Tahun 2000} &= \frac{41.250.000}{153.898.000} \times 100\% = 26.80\% \\
\text{Tahun 2001} &= \frac{42.625.000}{155.432.241} \times 100\% = 27.42\% \\
\text{Tahun 2002} &= \frac{45.650.000}{166.105.000} \times 100\% = 27.48\% \\
\text{Tahun 2003} &= \frac{53.625.000}{200.157.000} \times 100\% = 26.79\%
\end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan di atas dapat dilihat bahwa tingkat efisiensi pajak hotel dan restoran di Kabupaten Purworejo pada tahun anggaran 1989/1990 sampai dengan 2003 bervariasi antara 24.66% sampai dengan 27.49%. Pada tahun anggaran 1989/1990 tingkat efisiensi pajak hotel dan restoran sebesar 25.49% dan pada tahun 1990/1991 tingkat efisiensi naik menjadi 26.06%, untuk tahun 1991/1992 naik lagi menjadi 27.21%, tahun 1992/1993 juga naik 27.26%.

Sedangkan pada tahun 1993/1994 tingkat efisiensi turun menjadi 26.98%, tahun 1994/1995 tingkat efisiensi turun sebesar 24.66% ini merupakan tingkat efisiensi paling baik selama lima belas tahun terakhir atau 1989/1991 – 2003. Pada tahun 1995/1996 tingkat efektifitas kembali naik menjadi 26.56%, tahun berikutnya yaitu 1996/1997 naik menjadi 27.37%, dan tahun 1997/1998 turun menjadi 27.04%. sedangkan tahun 1998/1999 naik menjadi 27.49% ini adalah tingkat efektifitas yang paling buruk selama lima belas tahun terakhir.

Pada tahun 1999/2000 tingkat efisiensi turun menjadi 26.80%, tahun 2001 naik lagi menjadi 27.42%, tahun 2003 tingkat efisiensi kembali naik menjadi 27.48% dan pada tahun 2003 tingkat efisiensi turun menjadi 26.79%. naik turunnya tingkat efisiensi pajak hotel dan restoran disebabkan karena kurang optimalnya kinerja pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel dan restoran. Selain itu juga banyaknya hotel dan restoran yang tidak melaporkan pendapatannya secara benar dan sungguh-sungguh.

6.5. Analisis Regresi

Analisis ini merupakan suatu metode dengan cara mendeskripsikan faktor-faktor yang berhubungan dengan permasalahan yang dimaksud yaitu untuk mendeskripsikan pengaruh jumlah hotel dan restoran, tingkat inflasi dan jumlah wisatawan nusantara terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Purworejo, hal ini sebagai pendukung analisis kuantitatif. Penelitian ini berkaitan dengan analisis kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Purworejo yang dipengaruhi oleh faktor jumlah hotel dan restoran, tingkat inflasi, jumlah wisatawan nusantara yang dapat dilihat pada tabel 6.5.

Keterangan tabel 6.5 :

Tahun anggaran 1989/1990-1998/1999 berjalan dari tanggal 1 April – 31 Maret (12 bulan). Tahun 1999/2000 hanya 9 bulan di mulai dari 1 April 1999– 31 Desember 2000. Tahun anggaran 2000-2003 dimulai dari 1 Januari – 31 Desember (1 tahun).

Tabel 6.5.
Realisasi Pajak Hotel dan Restoran, Jumlah Hotel dan Restoran, Inflasi,
Jumlah Wisatawan Nusantara di Kabupaten Purworejo
Tahun 1989/1990-2003

Tahun Anggaran	Realiasi Pajak Hotel Restoran (Rp)	Jumlah Hotel Restoran (Unit)	Inflasi (%)	Jumlah wisatawan nusantara (orang)
1989/1990	18.333.751	90	10,73	10.204
1990/1991	21.104.673	111	8,38	10.810
1991/1992	23.244.541	144	4,40	14.512
1992/1993	25.215.233	168	10,01	10.777
1993/1994	28.567.098	190	8,42	50.555
1994/1995	32.336.722	199	9,48	65.425
1995/1996	33.129.555	234	7,20	78.665
1996/1997	33.648.149	253	8,09	101.572
1997/1998	50.832.054	267	4,09	177.564
1998/1999	51.015.474	244	10,74	200.256
1999/2000	55.615.474	279	4,16	202.018
2000	153.898.124	281	8,42	152.365
2001	155.432.241	299	15,97	101.805
2002	166.105.100	300	10,97	125.615
2003	200.157.000	334	3,21	144.777

Sumber: Dipenda, Dinas kebudayaan dan Pariwisata, Badan Pusat Statistik Purworejo

Hasil analisis regresi meliputi penyajian hasil regresi hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen secara statistik langkah analisis yang dilakukan adalah meliputi variabel-variabel independen secara individu, secara serentak dan asumsi klasik.

6.5.1. Hasil Regresi Linier Berganda

Tabel 6.6.
Hasil Regresi Realisasi Pajak Hotel dan Restoran
Di Kabupaten Purworejo

Dependent Variable: RPHR
 Method: Least Squares
 Date: 09/20/05 Time: 20:40
 Sample: 1989 2003
 Included observations: 15

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.39E+08	48424487	-2.866298	0.0153
JHR	1023101.	259594.5	3.941149	0.0023
TI	26819.56	33429.38	0.802275	0.4394
JW	-574.3472	276.2945	-2.078750	0.0618
R-squared	0.651305	Mean dependent var		59815679
Adjusted R-squared	0.556206	S.D. dependent var		61122004
S.E. of regression	40718154	Akaike info criterion		38.10542
Sum squared resid	1.82E+16	Schwarz criterion		38.29424
Log likelihood	-281.7907	F-statistic		6.848733
Durbin-Watson stat	0.761850	Prob(F-statistic)		0.007209

Sumber : Data olah

Keterangan :

RPHR : Realisasi Pajak Hotel dan Restoran (rupiah)

JHR : Jumlah Hotel dan Restoran (unit)

TI : Tingkat Inflasi (persen)

JW : Jumlah Wisatawan Nusantara (orang)

Hasil regresi yang disajikan pada tabel 6.6. menunjukkan bahwa hasil regresi berganda untuk Realisasi Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Purworejo adalah:

R ²	= 0.651305.
Adjusted R-Squared	= 0.556206.
Durbin-Watson Statistik	= 0.761850.
F-Statistik	= 6.848733.

6.5.2 Regresi R Squared (R²)

R squared sebesar 0.651305 ini menunjukkan bahwa dengan nilai angka sebesar 65.1305 variabel independen yang berupa jumlah hotel dan restoran, tingkat inflasi dan jumlah wisatawan mampu menjelaskan variabel realisasi pajak hotel dan restoran atau bisa juga dikatakan bahwa ketiga variabel independen tersebut mempunyai pengaruh sebesar 65.1305 terhadap variabel realisasi pajak hotel dan restoran, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel-variabel lain selain ketiga independen tersebut (dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak termasuk dalam model).

6.5.3. Uji Regresi dengan Menggunakan Probabilitas

Dari hasil Regresi diatas menunjukkan bahwa nilai Probabilitas Jumlah Hotel dan Restoran, signifikan pada tingkat alpha 5% karena < 0,05, tetapi untuk tingkat inflasi dan jumlah wisatawan nusantara tidak signifikan karena alphanya > 0,05 jadi dari ketiga variabel tersebut hanya satu variabel yang signifikan yaitu

Jumlah Hotel dan Restoran sedangkan yang tidak signifikan adalah Tingkat Inflasi dan Jumlah Wisatawan, sedangkan Jumlah Hotel dan Restoran mempunyai hubungan yang positif terlihat pada koefisien hasil regresinya.

6.5.4. Uji Regresi Secara Keseluruhan dengan menggunakan Probabilitas (F-Statistik)

F-statistik menggambarkan hasil analisis regresi variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen (yang terpengaruh). Dari hasil analisis menunjukkan bahwa F-statistik sebesar 6.848733 dan dengan Probabilitas 0.007209 dengan alpha 5% (0,05), terlihat probabilitasnya lebih kecil dari alpha yaitu $0.007209 < 0,05$, dengan demikian variable independent secara bersama sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen atau realisasi pajak hotel dan restoran.

6.5.5 Pengujian Asumsi Klasik

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui (mendeteksi) ada atau tidaknya Heterokedastisitas, Autokorelasi, Multikolinieritas pada hasil regresi yang akan dianalisis. Karena apabila terjadi penyimpangan terhadap asumsi klasik tersebut, uji T dan uji F yang dilakukan sebelumnya menjadi tidak valid dan secara statistik kesimpulan akhir yang diperoleh hasilnya menjadi tidak baik.

6.5.5.1. Heterokedastisitas

Untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas digunakan uji White Heteroskedasticity Test yang hasilnya dapat dilihat pada tabel 6.7.

Tabel 6.7.
White Heteroskedasticity Test

White Heteroskedasticity Test:				
F-statistic	3.251163	Probability	0.063432	
Obs*R-squared	10.63747	Probability	0.100248	
Test Equation:				
Dependent Variable: RESID ²				
Method: Least Squares				
Date: 09/20/05 Time: 20:43				
Sample: 1989 2003				
Included observations: 15				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.82E+15	3.25E+15	1.174376	0.2740
JHR	-5.99E+13	2.87E+13	-2.088923	0.0701
JHR ²	1.79E+11	5.77E+10	3.096622	0.0147
TI	5.64E+12	4.07E+12	1.386358	0.2030
TI ²	-4.00E+09	2.21E+09	-1.808064	0.1082
JW	-3.68E+09	3.29E+10	-0.111910	0.9137
JW ²	-16672.61	121643.2	-0.137062	0.8944
R-squared	0.709165	Mean dependent var	1.22E+15	
Adjusted R-squared	0.491038	S.D. dependent var	1.31E+15	
S.E. of regression	9.35E+14	Akaike info criterion	72.08630	
Sum squared resid	7.00E+30	Schwarz criterion	72.41672	
Log likelihood	-533.6472	F-statistic	3.251163	
Durbin-Watson stat	2.456321	Prob(F-statistic)	0.063432	

Sumber: Data olah

Dari uji heterokedastisitas tersebut diatas menunjukkan bahwa Probabilitasnya > 0.05 yang berarti bahwa tingkat realisasi pajak hotel dan restoran di Kabupaten Purworejo tidak terdapat adanya heterokedastisitas.

6.5.5.2. Autokorelasi

Untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi digunakan uji serial Correlation LM Test dengan menggunakan lag 1 yang hasilnya dapat dilihat pada tabel 6.8.

Tabel 6.8.
Hasil Uji Autokorelasi Dengan Serial LM Test

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:				
F-statistic	1.772597	Probability		0.229980
Obs*R-squared	5.989496	Probability		0.112122
Test Equation:				
Dependent Variable: RESID				
Method: Least Squares				
Date: 09/20/05 Time: 20:42				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-4171447.	52118573	-0.080038	0.9382
JHR	67166.75	241018.6	0.278679	0.7876
TI	-5941.694	43663.38	-0.136080	0.8951
JW	-53.88682	318.0147	-0.169448	0.8697
RESID(-1)	0.858633	0.430604	1.994023	0.0813
RESID(-2)	-0.612497	0.590044	-1.038053	0.3296
RESID(-3)	0.182929	0.705985	0.259112	0.8021
R-squared	0.399300	Mean dependent var		-4.17E-08
Adjusted R-squared	-0.051225	S.D. dependent var		36092786
S.E. of regression	37005675	Akaike info criterion		37.99577
Sum squared resid	1.10E+16	Schwarz criterion		38.32619
Log likelihood	-277.9682	F-statistic		0.886298
Durbin-Watson stat	1.730871	Prob(F-statistic)		0.545772

Sumber : data olah

Dari uji autokorelasi tersebut diatas dengan lag 1 menunjukkan bahwa Probabilitas < 0,05 yang berarti tidak ada penyakit Autokorelasi.

6.5.5.3. Multikolinieritas

Untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinieritas digunakan uji serial correlation LM Test yang hasilnya dapat dilihat pada tabel 6.9.

Tabel 6.9.
Hasil Uji Multikolinieritas Dengan Menggunakan Uji Korelasi

	RPHR	JHR	TI	JW
RPHR	1.000000	0.674863	0.182481	0.306812
JHR	0.674863	1.000000	-0.087788	0.814624
TI	0.182481	-0.087788	1.000000	-0.215405
JW	0.306812	0.814624	-0.215405	1.000000

Sumber: Data olah

Dari hasil uji Multikolinieritas dengan menggunakan uji korelasi tersebut di atas menunjukkan bahwa hasilnya $< 0,9$ yang berarti bahwa Realisasi Pajak Hotel dan Restoran tidak terdapat Multikolinieritas.

6.5.6 Interpretasi Hasil Regresi

Hasil persamaan regresi terlihat :

$$\text{RPHR} = a + B_1 X_1 \text{ JHR} + B_2 X_2 \text{ TI} + B_3 X_3 \text{ JW} + e_i$$

$$\text{RPHR} = -1.39\text{E}+08 + 1023101 \text{ JHR} + 26819.56 \text{ TI} - 574.3472 \text{ JW}.$$

Keterangan :

RPHR = Realisasi Pajak Hotel dan Restoran (Rupiah)

a = Konstanta

b_1, b_2, b_3	= Koefisien regresi
e_i	= Variabel pengganggu
X_1	= Jumlah Hotel dan Restoran (unit)
X_2	= Tingkat Inflasi (persen)
X_3	= Jumlah Wisatawan Nusantara (orang)

Dari persamaan hasil regresi diatas menunjukkan bahwa nilai Y (Realisasi Pajak Hotel dan Restoran) jika tidak dipengaruhi oleh Jumlah Hotel dan Restoran, Tingkat Inflasi, Jumlah Wisatawan Nusantara atau bisa juga dikatakan nilai ketiga variabel Independen (yang mempengaruhi) tersebut adalah 0, sehingga nilai realisasi pajak hotel dan restoran adalah sebesar $-1.39E+08$.

1. Jumlah Hotel dan Restoran = 1023101.

Dari hasil regresi berganda diatas, tanda parameter untuk Jumlah Hotel dan Restoran adalah positif yaitu 1023101 yang akan menunjukkan bahwa apabila jumlah hotel dan restoran naik atau bertambah 1 unit, maka akan mengakibatkan naiknya realisasi pajak hotel dan restoran sebesar 1.023.101 rupiah, hasil regresi dengan asumsi variabel yang lain tetap (Ceteris Paribus). Jumlah hotel dan restoran sesuai dengan hipotesis penelitian karena apabila jumlah hotel dan restoran bertambah akan mengakibatkan naiknya pajak hotel dan restoran.

2. Tingkat Inflasi = 26819.56.

Tanda parameter untuk tingkat inflasi adalah positif yaitu 26819.56, tetapi untuk variabel tingkat inflasi pada hasil output olah data E-Views

menunjukkan angka yang tidak signifikan. Nilai inflasi tidak sesuai dengan hipotesis penelitian karena apabila inflasi naik maka akan mengakibatkan turunnya realisasi pajak hotel dan restoran. Hal ini diakibatkan walaupun inflasi naik pengunjung hotel dan restoran tidak terpengaruh sehingga realisasi pajak hotel dan restoran masih dapat dicapai.

3. Jumlah Wisatawan Nusantara = -574.3472.

Tanda parameter untuk Jumlah Wisatawan Nusantara pada output di E-Views tidak signifikan. Hal tidak sesuai dengan hipotesis, karena naik turunnya Jumlah Wisatawan yang berkunjung ke objek wisata tidak mendukung adanya peningkatan penerimaan pajak hotel dan restoran. Hal ini dapat diartikan semakin meningkat wisatawan nusantara belum tentu meningkatkan penerimaan pajak hotel dan restoran karena wisatawan nusantara tidak menginap di hotel.

BAB VII

SIMPULAN DAN IMPLIKASI

7.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari analisis dan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Purworejo tahun anggaran 1989 – 2003 cukup bagus. Dengan kecenderungan mengalami kenaikan tiap tahunnya, dengan tingkat rata-rata 1.79 persen.
2. Tingkat efektifitas pajak hotel dan restoran di Kabupaten Purworejo pada tahun 1989 – 2003 sangat baik. Dengan melihat rata-rata efektifitas pajak hotel dan restoran Kabupaten Purworejo yang melebihi 100% atau rata-rata sebesar 102.04% setiap tahunnya, hal ini menunjukkan bahwa kinerja dalam pemungutan pajak hotel dan restoran Kabupaten Purworejo sangat baik. Karena realisasi pajak hotel dan restoran lebih besar dari pada target yang direncanakan.
3. Tingkat efisiensi pajak hotel dan restoran di Kabupaten Purworejo pada tahun anggaran 1989 – 2003 yaitu naik turun antara 24,66 persen sampai dengan 27,29 persen. Hal ini disebabkan karena kurang optimalnya kinerja pemerintah dalam meningkatkan efisiensi penerimaan pajak hotel dan restoran. Karena semakin kecil tingkat efisiensi, berarti semakin efisien kinerja dalam pemungutan pajak.

4. Dari variabel yang dianggap berpengaruh terhadap realisasi pajak hotel dan restoran yang dipilih dalam penelitian ini yang menggunakan alat regresi linier yaitu Jumlah hotel dan restoran, Tingkat inflasi, Jumlah wisatawan Nusantara dapat diperoleh besarnya R^2 sebesar 0.651305.
5. Dari hasil persamaan hasil regresi menunjukkan tanda parameter Jumlah hotel dan restoran adalah positif yaitu 1023101 yang menunjukkan bahwa apabila Jumlah Hotel dan Restoran naik atau turun 1 unit, maka akan mengakibatkan naiknya realisasi pajak hotel dan restoran sebesar 1.123.101 rupiah. Hasil regresi dengan asumsi variabel yang lain tetap (*ceteris paribus*).
6. Sedangkan hasil pengujian untuk Tingkat Inflasi adalah positif yaitu 26819.56, tetapi tidak signifikan hal ini diakibatkan kenaikan atau penurunan Tingkat Inflasi tersebut tidak mencerminkan kenaikan realisasi pajak hotel dan restoran secara nyata, sehingga naik atau turunnya Tingkat Inflasi tersebut tidak mencerminkan kenaikan realisasi pajak hotel dan restoran.
7. Hasil pengujian untuk Jumlah Wisatawan Nusantara tidak signifikan hal ini menunjukkan bahwa naik turunnya Jumlah Wisatawan Nusantara yang berkunjung ke objek wisata tidak mendukung adanya peningkatan penerimaan pajak hotel dan restoran. Hal ini dapat diartikan semakin meningkat wisatawan nusantara belum tentu meningkatkan penerimaan pajak hotel dan restoran karena dimungkinkan wisatawan nusantara membawa bekal makanan sendiri dan tidak menginap di hotel.

7.2. Implikasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah dilakukan, maka penulis dapat memberikan implikasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang berhubungan dengan pengaruh pajak hotel dan restoran.

1. Kontribusi pajak dan hotel sudah cukup baik sehingga harus di pertahankan dan kalau bisa semakin di tingkatkan agar kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD semakin besar .
2. Efektifitas pajak hotel dan restoran sudah bagus dan perlu dipertahankan. Sedangkan efisiensi perlu ditingkatkan karena dengan semakin efisiensinya penerikan pajak hotel dan restoran akan semakin meningkatkan realisasi pajak hotel dan restoran dalam menyumbang PAD.
3. Dari hasil persamaan regresi di peroleh bahwa Jumlah hotel dan restoran merupakan penyumbang realisasi pajak hotel dan restoran sehingga di harapkan pemerintah Kabuapten Purworejo dapat memaksimalkan penarikan pajak hotel dan restoran.